SALINAN

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi, telah dilakukan perubahan tugas dan fungsi serta Indikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara;

b. bahwa Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 belum memenuhi kebutuhan organisasi saat ini karena belum menampung perubahan tugas dan fungsi serta Indikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
7. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut dengan Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan Kementerian Sekretariat Negara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Utama, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan Kementerian Sekretariat Negara sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Pasal 3

Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 dipergunakan sebagai pedoman bagi satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 4

Renstra Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Sekretariat Negara tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Matriks Kerangka Regulasi Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2018

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,
dan Akuntabilitas Kinerja,

Agussalim

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2015-2019

RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2015-2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. Penyusunan Rencana Strategis

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 serta telah disinergikan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Renstra 2015-2019 berisikan kajian lingkungan yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan. Renstra disusun untuk menjadi rujukan para pejabat dan pegawai di Kementerian Sekretariat Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada periode 2015-2019.

Seiring dengan dinamika yang berkembang di Kementerian Sekretariat Negara, maka Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 harus disesuaikan. Penyesuaian itu adalah sehubungan adanya penambahan kelembagaan di lingkungan Biro Tata Usaha Sekretariat Kementerian, yaitu Bagian Dukungan

Pengelolaan . . .

Pengelolaan Bahan Kebijakan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara; serta adanya penetapan Indikator Kinerja Utama di tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Negara dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi:

a. dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden;

b. dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara;

c. dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;

d. dukungan . . .

d. dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi, serta permintaan persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang undangan;

e. dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri;

f. dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden;

g. pembinaan, penataan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara, organisasi, tata laksana, dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;

h. pembinaan dan pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, penyediaan prasarana dan sarana, serta pengembangan pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk pejabat negara tertentu, dan dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan;

i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara;

j. penyelenggaraan koordinasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan Mitra Pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri;

k. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara dilakukan melalui unsur organisasi yang terdiri dari:

a. Sekretariat Kementerian;
b. Sekretariat Presiden;
c. Sekretariat Wakil Presiden;
d. Sekretariat Militer Presiden;
e. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
f. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
g. Deputi Bidang Administrasi Aparatur;
h. Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan;
i. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Maritim, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
j. Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan;
k. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
l. Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan;
m. Inspektorat; dan
n. Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara, terdapat 3 (tiga) orang Staf Khusus Menteri yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri sesuai penugasan Menteri dan bukan merupakan bidang tugas unsur-unsur organisasi Kementerian Sekretariat Negara.

Tugas dari susunan organisasi Kementerian Sekretariat Negara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan teknis dan administrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk pejabat negara tertentu, dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan, dan koordinasi kerja sama teknik antara pemerintah Indonesia dengan Mitra Pembangunan dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri;

b. Sekretariat Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media kepada Presiden;

c. Sekretariat Wakil Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara;

d. Sekretariat Militer Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang wewenangnya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;

e. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi, serta permintaan persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan;

f. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri;

g. Deputi Bidang Administrasi Aparatur mempunyai tugas menyelenggaraan pemberian dukungan teknis dan administrasi

serta analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta pembinaan, penataan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara, organisasi, tata laksana, dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;

h. Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri sesuai keahliannya.

i. Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

j. Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

a. Capaian IKU Tahun 2015

Sepanjang tahun 2015-2016 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Sekretariat Negara IKU yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

Pada tahun 2015, IKU tersebut dilakukan penyempurnaan sesuai rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dan hasil pemutakhiran IKU dari Kementerian PANRB.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015, capaian IKU Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1) persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden, dicapai 100%;
2) persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup

menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden, dicapai 100%;

3) persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden, dicapai 100%;
4) persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden, dicapai 100%;
5) persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden, dicapai 100%;
6) persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden, dicapai 100%;
7) persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti, dicapai 100%;
8) persentase efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara, dicapai 100%;
9) persentase kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden, dicapai 100%;
10) persentase kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden, dicapai 100%; dan
11) persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman, dicapai 100%.

b. Capaian IKU Tahun 2016

Dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian Sekretariat Negara agar lebih berorientasi *outcome,* Kementerian Sekretariat Negara kembali melakukan pemutakhiran IKU yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Tahun 2016, capaian IKU Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1) persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden, dicapai 100%;
2) persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden, dicapai 100%;
3) persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden, dicapai 100%;
4) persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden, dicapai 100%;
5) persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden, dicapai 100%;
6) persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden, dicapai 100%;
7) persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti, dengan realisasi sebesar 42% dari target sebesar 35%, dengan demikian capaiannya adalah sebesar 100%;
8) indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara, dengan realisasi sebesar 2,81 dari target sebesar 2,75, dengan demikian capaiannya adalah sebesar 100%;
9) indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden, dengan realisasi sebesar 4,93 dari target sebesar 4,44, dengan demikian capaiannya adalah sebesar 100%;
10) indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden, dengan realisasi sebesar 4,97 dari target sebesar 4,44, dengan demikian capaiannya adalah sebesar 100%; dan
11) persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman, dicapai 100%.

4. Reformasi Birokrasi

Sejak tahun 2005 hingga tahun 2017 Kementerian Sekretariat Negara terus melakukan Reformasi Birokrasi secara terencana, komprehensif, sistematik dan berkelanjutan pada bidang kelembagaan,

ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sistem informasi manajemen.

Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan reformasi birokrasi sejak tahun 2005 yang dilakukan secara terencana, komprehensif, sistematik, dan berkelanjutan pada beberapa bidang yaitu: kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Sekretariat Negara mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Di sepanjang tahun 2015-2016 reformasi birokrasi di Kementerian Sekretariat Negara telah terlaksana dengan baik. Hal itu tercermin dari hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Sekretariat Negara yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, indeks reformasi birokrasi Kementerian Sekretariat Negara tahun 2015 adalah 73,66 dengan kategori ”BB”, dan pada tahun 2016 adalah 77,20 dengan kategori “BB”, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 1
Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi

No.	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Nilai 2015	Nilai 2016
A	**Komponen Pengungkit**			
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,33	3,94
2	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	5,00	4,38	2,71
3	Penguatan Kelembagaan	6,00	4,50	3,84
4	Penguatan Tatalaksana	5,00	3,35	3,60
5	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	15,00	13,37	13,39
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	6,00	3,61	3,95
7	Penguatan Sistem Pengawasan	12,00	6,19	8,37
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,66	4,23
	Total Komponen Pengungkit (A)	**60,00**	**36,38**	**44,02**
B	**Komponen Hasil**			
1	Nilai akuntabilitas kinerja	14,00	10,36	10,38

No.	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Nilai 2015	Nilai 2016
2	Survei internal integritas organisasi	6,00	5,31	5,41
3	Survei eksternal persepsi korupsi	7,00	5,29	6,13
4	Opini BPK	3,00	2,50	3,00
5	Survei eksternal pelayanan publik	10,00	7,83	8,28
	Total Komponen Hasil (B)	**40,00**	**31,28**	**33,17**
	Indeks Reformasi Birokrasi (A=B)	**100,00**	**73,66**	**77,20**

5. Kinerja Laporan Keuangan

Sebagai bagian dari kinerja selama tahun 2015-2016, Kementerian Sekretariat Negara telah berupaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran pembangunan. Sesuai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, BPK menyatakan pendapat ”Wajar Tanpa Pengecualian” (*unqualified opinion*) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara secara berturut-turut sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016.

Dalam melaksanakan program-program yang terdapat di dalam Rencana Strategis Tahun 2010–2014, Kementerian Sekretariat Negara juga telah berhasil melakukan efisiensi penggunaan anggaran. Realisasi anggaran Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2010-2014 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Realisasi Anggaran Kementerian Sekretariat Negara
Tahun 2010 s.d. 2014

Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
Pagu (DIPA) (*dalam ribuan Rp)*	1.908.432.847	1.998.616.060	2.081.087.876	2.492.814.722	2.350.385.456
Realisasi (*dalam ribuan Rp)*	1.532.160.821	1.613.084.973	1.624.055.424	1.984.673.033	2.003.211.767
% Realisasi	80.28	80.71	78.04	79.62	85.23

Sedangkan realisasi anggaran hasil pelaksanaan program-program yang terdapat di dalam Rencana Strategis Tahun 2015 dan 2016, Kementerian Sekretariat Negara disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 . . .

Tabel 3
Realisasi Anggaran Kementerian Sekretariat Negara
Tahun 2015 s.d. 2016

Uraian	Tahun 2015	Tahun 2016
Pagu (DIPA) (*dalam ribuan Rp)*	2.446.302.966	2.640.905.224
Realisasi (*dalam ribuan Rp)*	1.989.282.791,79	2.120.591.297,69
% Realisasi	81.32	80.3

6. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Penilaian penerapan dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara terus mengalami peningkatan dari 74,02 pada tahun 2014, menjadi 74,15 pada tahun 2015, dengan predikat "BB".

B. Potensi dan Permasalahan

Kementerian Sekretariat Negara sebagai instansi pemerintah yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden sering kali menghadapi masalah, baik masalah internal maupun eksternal, sehingga harus berupaya memperbaiki diri dengan cara melakukan pencermatan terhadap lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi dan lingkungan eksternal organisasi berupa peluang dan tantangan yang nantinya akan dianalisis menjadi analisis lingkungan strategis.

Untuk melakukan analisis lingkungan tersebut, dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), yaitu suatu alat manajemen untuk mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal organisasi sehingga hasilnya dapat memberikan informasi mengenai isu-isu penting bagi organisasi. Kegiatan analisis SWOT dimulai dengan identifikasi dan pencermatan terhadap aspek internal organisasi, baik aspek positif berupa kekuatan (*Strengths)* organisasi maupun aspek negatif berupa kelemahan (*Weaknesses)* organisasi. Selanjutnya dari eksternal organisasi dilakukan identifikasi dan pencermatan terhadap peluang (*Opportunities)* dan tantangan *(Threats)*. Analisis SWOT di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Kekuatan (*Strengths)*

a. Posisi dan Peran Strategis Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Sekretariat Negara selain mempunyai fungsi pelayanan teknis administrasi dan analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden, juga memiliki fungsi koordinasi dengan kementerian dan lembaga-lembaga negara. fungsi pelayanan antara lain berupa penyelenggaraan teknis Sekretariat Presiden dan Wakil Presiden, protokoler, serta pengamanan Presiden dan keluarganya; sedangkan ke fungsi-fungsi koordinasi dengan kementerian dan lembaga-lembaga negara antara lain berupa koordinasi penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, pelayanan koordinasi pemerintahan, serta dukungan penyiapan naskah-naskah Presiden dan Wakil Presiden, baik dalam bentuk surat, perjanjian, naskah pidato kenegaraan serta pidato-pidato kepresidenan lainnya.

Fungsi analisis adalah dalam penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan yang diajukan kementerian teknis, yang biasanya memerlukan analisis akhir berupa harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta penjaminan bahwa rancangan itu sejalan dengan visi dan misi Presiden. Fungsi ini semakin penting jika suatu rancangan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh suatu Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) terkadang terpaku pada visi dan kepentingan sektoralnya masing-masing. Oleh karena itu Kementerian Sekretariat Negara berperan penting dan strategis sebagai *filter* terakhir dalam proses penyusunan dan perumusan kebijakan pemerintah yang akan diputuskan oleh Presiden dan Wakil Presiden.

b. Komitmen Pimpinan yang Tinggi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara, Menteri Sekretaris Negara sebagai pimpinan mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberikan dukungan teknis, administrasi, serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariat negara yang terbaik untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Komitmen yang tinggi tersebut menjadi motivasi yang kuat kepada seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Sekretariat Negara dalam memberikan pelayanan yang prima kepada Presiden dan Wakil

Presiden. Hal ini ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Selain itu, komitmen tinggi pimpinan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya pada aspek kelembagaan dapat dilihat dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut menunjukkan Kementerian Sekretariat Negara dapat melakukan perubahan secara bertahap, berkesinambungan, dan sistematis guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Komitmen yang tidak kalah pentingnya adalah akselerasi peningkatan kualitas pelaksanaan tugas yang dituangkan melalui reformasi birokrasi internal Kementerian Sekretariat Negara melalui debirokratisasi, digitalisasi dan pengembangan sumber daya manusia aparatur. Di kurun waktu 2015-2017, kegiatan debirokratisasi untuk mempercepat pelaksanaan tugas mulai dari pemangkasan sejumlah rantai birokrasi (*debottlenecking*) hingga pencetusan sejumlah inovasi dan langkah terobosan baru terus digulirkan secara intensif. Demikian pula digitalisasi, yang ditandai dengan dukungan penuh Menteri Sekretaris Negara terhadap otomatisasi sejumlah rutinitas kedinasan guna tidak saja mempercepat prosesinya namun juga mempertinggi akurasi dan akuntabilitasnya. Terhadap pengembangan sumber daya manusia aparatur, sepanjang tahun 2015-2016 telah digagas sejumlah regulasi baru di Kementerian Sekretariat Negara yang ditujukan untuk memfasilitasi studi pascasarjana bagi aparatur maupun kegiatan pendidikan dan pelatihan kedinasan sesuai jenjang jabatannya masing-masing.

2. Kelemahan (*Weaknesses)*

a. Belum Adanya Konektivitas Proses Bisnis Antar Unit Organisasi

Sampai dengan tahun 2017 Kementerian Sekretariat Negara telah memiliki 943 *Standard Operating Procedures* (SOP) dan standar pelayanan. Sebagian besar SOP dan standar pelayanan yang telah disusun tersebut baru menggambarkan proses bisnis

pada unit kerja masing-masing, belum tersambung dengan proses bisnis pada unit kerja lainnya yang terkait. Padahal banyak urusan yang ditangani Kementerian Sekretariat Negara melibatkan beberapa unit kerja atau bahkan satuan organisasi yang terkait. Misalnya penyiapan acara Presiden, paling tidak melibatkan tiga satuan organisasi dan beberapa unit kerja di lingkungannya, seperti Biro Tata Usaha Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara sebagai *entry point* yang menerima surat permohonan acara dari Kementerian/Lembaga/masyarakat kepada Presiden, Kedeputian Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan beserta unit kerja yang terkait di bawahnya sebagai satuan organisasi dan unit kerja yang memproses substansi surat, dan Sekretariat Presiden yang paling tidak meliputi Biro Protokol, Biro Umum, Biro Administrasi, serta Biro Pers dan Media, yang seluruhnya bertanggung jawab dalam penyiapan urusan keprotokolan dan kerumahtanggaan untuk acara Presiden tersebut sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Ketiadaan konektivitas proses bisnis tersebut telah mengakibatkan kinerja pelayanan terhadap Presiden menjadi kurang optimal.

b. Potensi Pelambatan Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi Internal Kementerian Sekretariat Negara

Di sepanjang tahun 2015-2016, reformasi birokrasi internal yang terdiri dari debirokratisasi, digitalisasi dan pengembangan sumber daya manusia telah dilaksanakan secara intensif. Namun dibalik intensitas pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, utamanya dalam proses harmonisasi peraturan Menteri Sekretaris Negara yang harus mengacu pada beberapa ketentuan dari Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Negara. Selain itu, digitalisasi terhadap segenap kegiatan kedinasan, juga kadangkala dihadapkan dengan kendala penyediaan anggaran yang diperlukan dalam modernisasi perangkat teknologi informasi dan telekomunikasi.

3. Peluang (*Opportunities)*

a. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar atas sistem kerja

pemerintahan pada bidang organisasi, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang telah dilaksanakan mulai tahun 2005, meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, manajemen sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen, telah memberikan manfaat dan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja satuan organisasi/unit kerja.

Reformasi birokrasi merupakan proses berkelanjutan dan terus disempurnakan seiring dengan dinamika perubahan lingkungan. Hal tersebut merupakan peluang bagi pegawai untuk terus berupaya mengembangkan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif serta menerapkannya dalam pelaksanaan tugas, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Reformasi birokrasi ini makin diakselerasi dengan agenda prioritas yang diamanatkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara yaitu Reformasi Birokrasi Internal Kementerian Sekretariat Negara yang berintikan pada debirokratisasi seluruh rantai kedinasan, digitalisasi pelaksanaan tugas dengan fokus pada otomatisasi rutinitas serta pengembangan sumber daya manusia aparatur.

b. Penguatan Peran Kementerian Sekretariat Negara dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas-Tugas Kepresidenan

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015–2019, diamanatkan adanya strategi penguatan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya (Agenda NAWA CITA ke-2).

Peluang yang sangat baik ini dapat berubah menjadi tantangan, apabila Kementerian Sekretariat Negara tidak mampu menjawab harapan dan kepercayaan yang telah diberikan dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan yang prima.

4. Tantangan *(Threats)*

a. Menjadi Teladan Bagi Kementerian/Lembaga Lain Dalam Hal Efisiensi, Akuntabilitas, dan Peningkatan Kinerja

Melihat peran Kementerian Sekretariat Negara yang sangat penting dalam penyelenggaraan kenegaraan, maka Kementerian Sekretariat Negara dituntut untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat tanpa kesalahan.

Hal itu sehubungan bahwa sekecil apapun kesalahan atau keterlambatan penyelesaian layanan Kementerian Sekretariat Negara akan memiliki dampak yang signifikan bagi penyelenggaraan pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, terdapat tantangan dalam melaksanakan pelayanan yang *input*-nya diterima dari instansi lain. Misalnya, penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, administrasi pengangkatan/ pemberhentian pejabat negara tertentu dan kenaikan pangkat aparatur sipil negara, dan lain-lain.

Keterlambatan penyelesaian dalam pemberian layanan tersebut di atas dengan sebab *input* yang diberikan oleh instansi lain tidak memadai, seringkali menempatkan Kementerian Sekretariat Negara sebagai instansi yang “tertuduh” lamban dan tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya. Akibatnya, kinerja Kementerian Sekretariat Negara dan kantor kepresidenan dianggap buruk.

Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, Kementerian Sekretariat Negara berupaya secara optimal menjalin kerja sama yang sinergis dan harmonis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

b. Pesatnya Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Menuntut Perumusan Regulasi Dan Budaya Kerja yang Adaptif

Tantangan lain yang harus kita hadapi adalah dinamika pembangunan yang sangat distruptif yang utamanya disebabkan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Dinamika pembangunan disruptif ditandai dengan fenomena 3S -- *surprise, sudden shift, speed*--. Dalam menyikapi kondisi itu, Kementerian Sekretariat Negara dituntut untuk dapat menyelaraskan tugas dan fungsinya dengan menggunakan teknologi yang telah berkembang. Teknologi sebagai alat bantu dalam penyelesaian tugas dan fungsi harus dimanfaatkan secara optimal. Demikian pula, semangat berinovasi yang harus terus

diperluas bahkan dibudayakan di semua lini pelaksanaan tugas mempertinggi akurasi dan akuntabilitasnya.

Demikian pula regulasi yang diterbitkan Kementerian Sekretariat Negara juga harus mampu menjawab tantangan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Budaya kerja di Kementerian Sekretariat Negara juga harus disesuaikan dengan perkembangan serta kemajuan teknologi informasi.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka memberikan dukungan pelayanan teknis, administrasi dan analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara guna menyukseskan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Kementerian Sekretariat Negara telah menetapkan visi Kementerian.

Visi Kementerian Sekretariat Negara adalah sebagai berikut:

> **"Kementerian Sekretariat Negara yang andal dalam memberikan pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"**

Visi Kementerian Sekretariat Negara ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Presiden sebagai *the single chief of executive* (Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan). Visi tersebut diarahkan untuk membawa Kementerian Sekretariat Negara menjadi suatu organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel serta dengan kualitas pelaksanaannya yang prima, berintegritas, efektif dan efisien.

B. Misi Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian Sekretariat Negara ditetapkan misi Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut:

1. **Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;**
2. **Memberikan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden;**
3. **Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;**
4. **Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan**
5. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara**

C. Tata Nilai Kementerian Sekretariat Negara

C. Tata . . .

Sesuai dengan karakteristik tugas yang harus dilaksanakan, [illegible] nilai dalam kehidupan organisasi Kementerian Sekretariat Negara yang harus dianut dan dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. **Andal** mengandung arti suatu kondisi dimana seluruh unsur dalam Kementerian Sekretariat Negara dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan tanpa kesalahan (*zero mistake*).
2. **Profesional** mengandung arti memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan, memiliki kompetensi di bidangnya, mengembangkan potensi dan kapasitas diri, etos kerja berprestasi, serta menjunjung tinggi etika profesi.
3. **Transparan** mengandung arti membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
4. **Akuntabel** mengandung arti bahwa setiap kegiatan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tanggung gugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **Prima** mengandung arti sebagai yang utama, sempurna atau sangat baik dan memuaskan. Prima juga bermakna kesanggupan untuk menyelesaikan tugas tanpa kesalahan (*zero mistake*), aman dan mampu memelihara keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dengan kerahasiaan negara.
6. **Integritas** mengandung arti mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
7. **Efektif** mengandung arti bahwa setiap usaha dan tindakan yang dilakukan dapat berhasil guna.
8. **Efisien** mengandung arti bahwa mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya.

D. Tujuan

D. Tujuan . .

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Sekretariat Negara, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis.

Tujuan strategis organisasi merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang agar diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dengan menggunakan potensi yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada, memanfaatkan potensi untuk mengatasi ancaman/tantangan, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, mewaspadai dan mengatasi ancaman/tantangan serta kelemahan untuk menuju terwujudnya visi dan misi organisasi, maka ditetapkan tujuan strategis Kementerian Sekretariat Negara yaitu:

Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden

Kementerian Sekretariat Negara menetapkan satu tujuan dengan pertimbangan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah sama, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, yaitu memberikan dukungan yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden. Dengan kata lain, Kementerian Sekretariat Negara harus selalu memberikan dukungan administratif, teknis dan analisis yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Pemberian dukungan teknis, analisis dan administratif itu, antara lain, diwujudkan dengan memfasilitasi alur informasi yang berkualitas, antara Presiden dengan para pemangku kepentingan pembangunan.

Pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, dapat diketahui melalui pencapaian indikator-indikator tujuan berikut ini.

1. Persentase hasil dukungan, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden.
2. Persentase pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden.

2. Persentase . . .

Nilai tingkat pencapaian indikator-indikator tujuan tersebut didapatkan melalui akumulasi capaian indikator-indikator sasaran strategis yang memiliki keterkaitan dengan masing-masing indikator tujuan.

Adapun indikator tujuan berikut target yang ingin dicapai di tahun 2019 digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4
Indikator Tujuan Kementerian Sekretariat Negara

No	Indikator Tujuan	Target 2019
1.	Persentase hasil dukungan administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%
2.	Persentase pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%

E. Sasaran Strategis

Penetapan sasaran strategis mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan-kegiatan, sehingga dapat bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan. Melalui kajian yang menyeluruh dan dengan memperhatikan indikator tujuan yang telah ditetapkan, maka Kementerian Sekretariat Negara menetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai penjabaran dari tujuan strategis yaitu:

1. Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden;
2. Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Pencapaian sasaran-sasaran strategis pada 2015 diukur melalui **sepuluh** Indikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara. Pengelompokan Indikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara

sesuai dengan sasaran strategis dan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5
Indikator Sasaran Strategis Kementerian Sekretariat N Tabel 5 . . .
Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2015
1. Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%
	2. Persentase hasil analisis gugatan, dan prerogatif serta naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%
	3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%
	4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%
	5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%
	6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%
	7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	100%
	8. Persentase kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri dan kerja sama teknik luar negeri yang diadministrasikan Kementerian Sekretariat Negara	100%
2. Terjaminnya pemberian layanan kerumahtangga-an dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	100%
	2. Persentase kelancaran dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden serta pengamanan VVIP	100%

Dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian Sekretariat Negara agar lebih berorientasi *outcome*, maka IKU tahun 2016-2019 telah dilakukan penyempurnaan sesuai rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi **sebelas** Indikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 6
Indikator Sasaran Strategis Kementerian Sekretariat Negara
Tahun 2016 s.d. 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target			
		2016	2017	2018	2019
1. Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%	100%	100%	100%
	5.Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	100%
	6.Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%	100%	100%
	7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	35%	40%	45%	50%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target			
		2016	2017	2018	2019
	8.Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	2,75	3,00	3,25	3,50
2. Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	1.Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44	4,44	4,59	4,72
	2.Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,44	4,44	4,59	4,72
	3.Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%	100%	100%	100%

Adapun keterkaitan antara tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis, dan indikator sasaran strategis yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 7
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015 s.d. 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Terwujudnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase hasil dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	1. Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden 2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
			sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden 3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden 4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden 5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden 6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden 7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti 8. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara
	2. Persentase pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	1. Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	1. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden 2. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden 3. Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sesuai dengan amanat Presiden RI telah ditetapkan kerangka visi pembangunan Indonesia 2014-2019 yaitu ”Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Usaha-usaha perwujudan visi Indonesia 2015 dijabarkan dalam 7 misi pembangunan sebagai berikut:

1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berdasarkan negara hukum;
3. mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional menuju Indonesia yang berdulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, ditetapkan 9 agenda prioritas, yaitu:

1. menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. memperkuat . . .

4. memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. melakukan revolusi karakter bangsa;
9. memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kementerian Sekretariat Negara ikut bertanggung jawab dalam menyukseskan upaya-upaya pemerintah tersebut di atas, dengan memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya yang dilaksanakan oleh unit organisasi Lembaga Perlidungan Saksi dan Korban, dan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya yang dilaksanakan oleh unit organisasi Sekretariat Wakil Presiden serta Sekretariat Negara.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sekretariat Negara

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Sekretariat Negara memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara, serta dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Arah kebijakan Kementerian Sekretariat Negara meliputi:

1. meningkatkan dukungan administrasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Kementerian Sekretariat Negara, mencakup peningkatan:
   a. kualitas pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan serta pengamanan Presiden dan Wakil Presiden;
   b. kualitas dukungan manajemen kepada Presiden dan Wakil Presiden
   c. kualitas dukungan administrasi dalam pengambilan kebijakan dan analisis perundang-undangan;

d. kualitas dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan;
e. kualitas dukungan pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat pemerintahan, TNI, dan POLRI;

2. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur dan pejabat negara tertentu;

3. meningkatkan pelayanan dukungan teknis dan analisis dalam pengambilan kebijakan dan perundang-undangan, mencakup peningkatan:
   a. Kualitas dukungan teknis dan analisis dalam pengambilan kebijakan dan analisis perundang-undangan;
   b. Hubungan kelembagaan dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan;
   c. Kualitas penanganan pengaduan masyarakat;

4. meningkatkan pembinaan kompetensi aparatur.

Arah kebijakan itu disinkronisasikan dengan strategi penguatan lembaga kepresidenan yang telah ditetapkan Presiden RI yaitu:

1. penguatan efektifitas komunikasi dan dialog langsung/blusukan untuk memberikan efek kejutan bagi rakyat dan birokrasi bahwa presiden tetap hadir dalam setiap persoalan mereka;

2. penguatan komunikasi politik yang efektif dengan media massa secara rutin untuk menginformasikan perkembangan pelaksanaan kebijakan dan mendapatkan input;

3. penguatan komunikasi politik rutin dengan tokoh-tokoh pimpinan parlemen untuk membicarakan isu-isu strategis demokrasi;

4. komunikasi presiden dengan jajaran di bawahnya sampai dengan eselon 1, pimpinan lembaga negara, dan para relawan untuk mengkonfirmasi hal-hal yang sangat krusial berbasis teknologi;

5. pembentukan *situation room* kepresidenan yang terintegrasi dengan sistem deteksi dini bencana alam dan konflik sosial politik di seluruh tanah air;

6. penataan hubungan antarkementerian untuk memperkuat sinergitas pelaksanaan agenda pembangunan nasional;

7. penataan hubungan konstruktif dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan agenda pembangunan nasional;

8. penguatan akurasi informasi strategis bagi Presiden didukung dengan teknologi;
9. pelaksanaan forum diskusi secara periodik dengan para akademisi dan praktisi internasional untuk melakukan diskusi terbatas dengan presiden dan pimpinan sejumlah kementerian yang relevan, serta kementerian perencanaan pembangunan nasional.

Arah kebijakan yang disinkronisasikan dengan strategi tersebut di atas dijabarkan melalui serangkaian program dan kegiatan yang dilakukan oleh satuan organisasi dan unit kerja masing-masing. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Guna menyukseskan Pemerintahan Kabinet Kerja masa bakti 2014-2019, hingga tahun 2019, Kementerian Sekretariat Negara melaksanakan 3 (tiga) program, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara; dan
3. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Program 1 dan 2 adalah program generik dan program 3 adalah program teknis. Program teknis merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) sedangkan program generik merupakan program-program yang digunakan oleh satuan organisasi yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal).

Pada ketiga program itu, terdapat beberapa kegiatan prioritas yaitu: ***Pertama,*** peningkatan kualitas, efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan teknis dan administrasi kepada presiden utamanya penjadwalan dan teknis acara kepresidenan, pengelolaan aset istana, layanan teknis kenegaraan serta komunikasi publik presiden; ***Kedua,*** pemberian dukungan substansi kepada presiden; ***Ketiga,*** peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; ***Keempat,*** peningkatan konsistensi regulasi dan kebijakan secara horizontal dan vertikal; dan ***Kelima,*** penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset negara yang dikelola Kementerian Sekretariat Negara.

Agar fleksibilitas anggaran dalam penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara kepada Presiden dan Wakil Presiden terlaksana secara maksimal dengan tetap memperhatikan akuntabilitas pelaksanaan anggaran, dan untuk pencapaian sasaran program dalam rangka peningkatan kinerja di B.A. 007 (Kemensetneg), pada tahun 2017 dilakukan penyederhanaan Program pada B.A. 007 (Kemensetneg) dari semula 3 program yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara (Kode: 007.01);
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kode: 007.02);
3. Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (Kode: 007.06).

menjadi 2 (dua) program yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara (Kode: 007.01);
2. Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (Kode: 007.06).

Adapun kegiatan yang semula berada pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kode: 007.02) dipindahkan ke program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara (Kode: 007.01).

Sebagai wujud dari sinkronisasi penguatan lembaga kepresidenan, segenap program dan kegiatan Kementerian Sekretariat Negara diarahkan untuk:

1. menjadikan Kementerian Sekretariat Negara dapat berperan sebagai fasilitator yang efektif dalam menjembatani komunikasi antar K/L dan antara K/L dengan Presiden dan Wakil Presiden serta komunikasi antar pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat;
2. memfasilitasi kelanjutan reformasi birokrasi di lingkungan kantor kepresidenan utamanya pada peningkatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan pengawasan internal serta perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi, khususnya secara lebih aman dan terenkripsi;

3. mendorong penguatan kelembagaan yang berkenaan dengan pengaduan masyarakat, pelayanan keprotokolan dan administrasi Presiden/Wakil Presiden, serta dukungan anggaran untuk belanja taktis yang diperlukan Presiden/Wakil Presiden dalam melakukan dialog langsung/blusukan. Dukungan-dukungan tersebut diharapkan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan aman. Pemberian dukungan seperti itu juga dipadukan dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel;
4. memastikan jalur komunikasi politik yang efektif utamanya dalam pemberian informasi berkenaan dengan kegiatan Presiden/Wakil Presiden kepada masyarakat luas serta dalam menindaklanjuti aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat secara tepat waktu, tepat prosedur dan tepat kualitas;
5. mendukung penyediaan konten yang tepat dan relevan pada setiap komunikasi politik antara Presiden (dan Wakil Presiden) dengan para tokoh politik dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
6. memfasilitasi penguatan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat memasok beragam dinamika penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk intensitas hubungan internasional dengan negara-negara sahabat dan kondisi kontijensi;
7. memfasilitasi percepatan penyelesaian produk hukum dan perundang-undangan serta pencegahan berbagai tumpang tindih dari peraturan dan perundang-undangan;

C. Kerangka Regulasi

Guna menyukseskan pelaksanaan program Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 diperlukan beberapa produk regulasi yang bersifat internal namun tidak menutup kemungkinan adanya regulasi yang akan mengatur secara eksternal yang disusun secara insidental dalam rangka mengatasi suatu permasalahan yang mungkin terjadi dan dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misinya Presiden, antara lain sebagai berikut.

Tabel 8
Kerangka Regulasi
Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019

No.	Arah Kerangka Regulasi/Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan/ Penyempurnaan Regulasi	Satuan Organisasi Penanggung Jawab	Target
1	Penyusunan/penyempurnaan Peraturan Menteri/Juklak/SOP/SP mengenai pemberian pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	Untuk menyesuaikan perkembangan dan kebijakan Presiden/ Wakil Presiden	Sekretariat Presiden dan Sekretariat Wakil Presiden	1 Peraturan Menteri dan 51 SOP (Setpres) 75 SOP (Setwapres)
2	Penyusunan/penyempurnaan Peraturan Menteri/Juklak/SOP/SP mengenai penanganan pendapat hukum dan analisis PUU	Untuk menyesuaikan perkembangan dan kebijakan mengenai penanganan pendapat hukum dan analisis PUU	Deputi Hukum dan PUU	62 SOP
3	Penyusunan/penyempurnaan Peraturan Menteri/Juklak/SOP/SP mengenai manajemen administrasi pejabat negara, pejabat pemerintahan, TNI, dan Polri	Untuk menyesuaikan perkembangan dan kebijakan mengenai manajemen administrasi pejabat negara, pejabat pemerintahan, TNI, dan Polri	Sekretariat Militer Presiden dan Deputi Bidang Administrasi Aparatur	1 Peraturan Menteri dan 11 SOP
4	Penyusunan/penyempurnaan Peraturan Menteri/Juklak/SOP/SP mengenai administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan serta pengamanan VVIP	Untuk menyesuaikan perkembangan dan kebijakan mengenai administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan serta pengamanan VVIP	Sekretariat Militer Presiden	9 SOP
5	Penyusunan/penyempurnaan Peraturan Menteri/Juklak/SOP/SP mengenai hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan	Untuk menyesuaikan perkembangan dan kebijakan mengenai hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan	Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	1 Peraturan Menteri dan 11 SOP

	serta pengaduan masyarakat	serta pengaduan masyarakat		
6	Penyusunan/penyempurnaan Peraturan Menteri/Juklak/SOP/SP mengenai kerja sama teknik luar negeri	Untuk menyesuaikan perkembangan dan kebijakan mengenai hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan serta pengaduan masyarakat	Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara	1 Peraturan Menteri dan 22 SOP
7	Penyusunan/penyempurnaan Peraturan Menteri/Juklak/SOP/SP mengenai urusan umum, perencanaan, anggaran, keuangan, tata usaha, SDM, organisasi, tata laksana, dan akuntabilitas kinerja.	Untuk menyesuaikan perkembangan dan kebijakan mengenai urusan umum, perencanaan, anggaran, keuangan, tata usaha, SDM, organisasi, tata laksana, dan akuntabilitas kinerja	Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara dan Deputi Bidang Administrasi Aparatur	63 Peraturan Menteri dan 40 SOP

D. Kerangka Kelembagaan

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Sekretariat Negara 2015-2019 telah dilakukan penataan kelembagaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan. Setelah dilakukan evaluasi organisasi, sinkronisasi tugas dan fungsi antar lembaga di lingkungan kesekretariatan kepresidenan, serta melalui pemetaan ulang tugas dan fungsi dalam struktur organisasi Kementerian Sekretariat Negara, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara, sebagaimana tercantum dalam bagan struktur organisasi berikut:

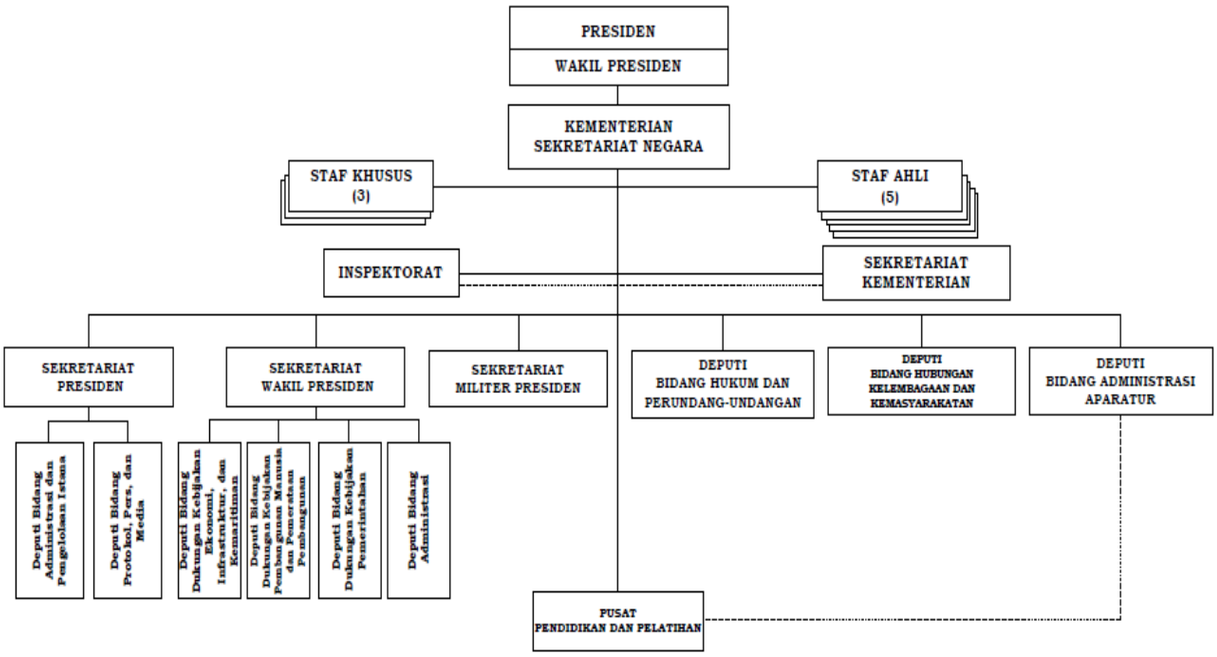
PRESIDEN
WAKIL PRESIDEN
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
STAF KHUSUS (3)
STAF AHLI (5)
INSPEKTORAT
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
SEKRETARIAT PRESIDEN
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI APARATUR
Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan
Deputi Bidang Administrasi
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Target kinerja Kementerian Sekretariat Negara menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai melalui program dan kegiatan Kementerian Sekretariat Negara dalam periode waktu Tahun 2015-2019.

1. Tahun 2015-2016

Pada tahun anggaran 2015-2016 masih menggunakan sasaran dan indikator kinerja program yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

Berikut tabel sasaran dan indikator kinerja per program:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara.

Tabel 9
Sasaran dan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program (*Outcome*)		Indikator Kinerja Program	Target	
			2015	2016
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada Menteri Sekretaris Negara di bidang perencanaan, keuangan, dan ketatausahaan	1. Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai dengan standar	100%	100%
		2. Kualitas opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara	WTP	WTP
		3. Persentase penatausahaan naskah dinas, arsip, dan pelayanan keprotokolan sesuai standar	100%	100%

2. Meningkatnya . . .

Sasaran Program (*Outcome*)		Indikator Kinerja Program	Target	
			2015	2016
2.	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengelolaan SDM serta pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase pegawai yang menduduki jabatan sesuai dengan standar kompetensi jabatan	50%	60%
3.	Meningkatnya efektivitas organisasi, tata laksana dan akuntabilitas kinerja	1. Persentase penyelesaian evaluasi dan analisis organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	100%	100%
		2. Persentase penyusunan/ penyempurnaan dan evaluasi dokumen di bidang ketatalaksanaan	100%	100%
		3. Persentase satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang mendapatkan nilai capaian kinerja “Memuaskan”	35%	40%
4.	Tersedianya layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang berkualitas	Persentase pelayanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi secara andal dan aman	100%	100%
5.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai standar	100%	100%
6.	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas Presiden melalui dukungan kerumahtanggaan	Persentase dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan yang sesuai dengan standar	100%	100%
7.	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas Presiden melalui dukungan keprotokolan	Persentase dukungan teknis dan administrasi keprotokolan yang sesuai dengan standar	100%	100%
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dan manajemen administrasi kepada Wakil Presiden di bidang perencanaan, keuangan, dan ketatausahaan	1. Persentase perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan dan manajemen kinerja yang disusun sesuai dengan standar	100%	100%
		2. Persentase penatausahaan pimpinan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%

Sasaran Program (*Outcome*)		Indikator Kinerja Program	Target	
			2015	2016
9.	Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Militer Presiden	Indeks kepuasan pengguna layanan di lingkungan Sekretariat Militer Presiden	3.75 (skala 5)	3.80 (skala 5)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara

Tabel 10
Sasaran dan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program (*Outcome*)		Indikator Kinerja Program	Target	
			2015	2016
1.	Tersedianya layanan penyediaan sarana dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara dan pejabat negara yang berkualitas	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara dan Pejabat Negara sesuai dengan standar	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan sarana dan prasarana bagi Wakil Presiden	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bagi Wakil Presiden sesuai dengan standar	100%	100%

c. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden

Tabel 11
Sasaran dan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program (*Outcome*)		Indikator Kinerja Program	Target	
			2015	2016
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kerja sama teknik luar negeri	Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri dan kerja sama teknik luar negeri yang diselesaikan sesuai dengan standar	100%	100%
2.	Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden dan/atau	Persentase dukungan hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah,	100%	100%

Sasaran Program (*Outcome*)		Indikator Kinerja Program	Target	
			2015	2016
	Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik	organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik sesuai standar		
3.	Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti sesuai dengan standar	100%	100%
4.	Terselenggaranya hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Persentase pelayanan hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sesuai standar	100%	100%
5.	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dan administrasi penanganan administrasi pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan pejabat lainnya	Persentase penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan pejabat lainnya yang diajukan kepada Presiden	100%	100%
6.	Terselenggaranya izin prakarsa, analisis dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi	1. Persentase penyelesaian hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi sesuai standar	100%	100%

Sasaran Program (*Outcome*)		Indikator Kinerja Program	Target	
			2015	2016
		2. Persentase penyelesaian administratif Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disampaikan/ disahkan/ ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan standar	100%	100%
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan keprotokolan dan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	1. Persentase kelancaran dukungan pemberian pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden	100%	100%
		2. Persentase kelancaran dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	100%	100%
8.	Meningkatnya kualitas analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman kepada Wakil Presiden	Persentase analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%
9.	Meningkatnya kualitas analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan kepada Wakil Presiden	Persentase analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%
10.	Meningkatnya kualitas analisis kebijakan di bidang pemerintahan kepada Wakil Presiden	Persentase analisis kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%	100%
11.	Terselenggaranya kegiatan VVIP, dukungan administrasi personel TNI dan Polri, dan penganugerahan tanda jasa, dan tanda kehormatan	Persentase dukungan pelayanan pengamanan VVIP yang terlaksana dengan lancar	100%	100%
		Persentase pelayanan administrasi TNI dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%	100%
		Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%	100%

2. Tahun . . .

2. Tahun 2017

Pada tahun anggaran 2017 telah dilakukan pemutakhiran sasaran dan indikator kinerja program berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2017.

Pemutakhiran sasaran dan indikator kinerja program dilakukan karena adanya perubahan tugas dan fungsi serta perubahan indikator kinerja utama di Kementerian Sekretariat Negara yang pada saat penyusunannya telah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Berikut tabel sasaran dan indikator kinerja per program:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

Tabel 12
Sasaran dan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program (*Outcome*)		Indikator Kinerja Program	Target 2017
1.	Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia	1. Persentase Rancangan Keputusan Menteri Sekretaris Negara tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara	100%
		2. Indeks kepuasan layanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	3.3
		3. Indeks kepuasan peserta pendidikan dan pelatihan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	4.1
		4. Indeks peningkatan kompetensi peserta pasca pendidikan dan pelatihan	3.6
2.	Meningkatnya efektivitas organisasi, tata laksana dan akuntabilitas kinerja	1. Persentase Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara di bidang organisasi yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara	100%
		2. Persentase hasil analisis jabatan dan evaluasi jabatan yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara	100%
		3. Persentase Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara di bidang tata laksana yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara	100%
		4. Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada seluruh satuan organisasi/satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kementerian	100%

Sasaran Program (*Outcome*)		Indikator Kinerja Program	Target 2017
		Sekretariat Negara dengan kategori AA (Sangat Memuaskan)	
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada Mensesneg di bidang perencanaan, keuangan, ketatausahaan, teknologi informasi dan komunikasi, dan penyediaan sarana dan prasarana	1. Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disetujui instansi terkait	100%
		2. Indeks kepuasan pengguna layanan administrasi keuangan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	2.75
		3. Kualitas opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara	WTP
		4. Indeks kepuasan pengguna layanan penatausahaan, naskah dinas, dokumen/arsip di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	3.00
		5. Indeks kepuasan layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	2.75
		6. Indeks Kepuasan layanan penyediaan sarana dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar	2.75
		7. Indeks Kepuasan layanan penyediaan sarana dan prasarana Pejabat Negara tertentu	2.75
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai standar	100
5.	Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden	1. Persentase kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden	100
		2. Persentase kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden	100
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan dukungan keprotokolan dan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	1. Persentase kelancaran dukungan pemberian pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden	100
		2. Persentase kelancaran dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	100
7.	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Militer Presiden	Indeks kepuasan pengguna layanan di lingkungan Sekretariat Militer Presiden	3.83

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara

Sejak tahun anggaran 2017, Kementerian Sekretariat Negara tidak lagi menggunakan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.

c. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden

Tabel 13
Sasaran dan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program (*Outcome*)		Indikator Kinerja Program	Target 2017
1.	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dan administrasi penanganan administrasi pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan pejabat lainnya	1. Persentase penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang diajukan kepada Presiden	100
		2. Persentase Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara	100
		3. Persentase RKeppres tentang kenaikan pangkat,pemberhentian,dan pensiun ASN yang menduduki JPT Utama,JPT Madya,dan Jabatan Fungsional Jenjang Utama, serta alih status perwira tinggi TNI/Polri sebagai ASN yang disetujui oleh Mensesneg	100
2.	Meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, serta penyiapan pendapat hukum	1. Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara	100
		2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara	100
		3. Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan	100

Sasaran Program (*Outcome*)		Indikator Kinerja Program	Target 2017
3.	Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden dan /atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik	Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti presiden, wakil presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik	100
4.	Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti	100
5.	Terselenggaranya hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Persentase pelayanan hubungan masyarakat terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar	100
6.	Meningkatnya efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kualitas pelayanan administrasi perjalanan luar negeri	Persentase efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	100
7.	Meningkatnya kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100
8.	Terselenggaranya kegiatan VVIP, dukungan administrasi personel TNI dan POLRI, dan penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan yang berkualitas	Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100
		Persentase pelayanan administrasi personel TNI dan POLRI yang disetujui oleh Presiden	100
		Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100

Selanjutnya, pada tahun anggaran 2017, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Kementerian Sekretariat Negara diamanatkan untuk melaksanakan kegiatan prioritas yang menjadi bagian dari prioritas nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017. Adapun kegiatan prioritas dimaksud terinci pada tabel berikut:

Tabel 14
Kegiatan Prioritas Nasional
Di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Program K/L	Kegiatan K/L	Sasaran	Indikator	Target Per Kegiatan Prioritas (2017)	Pelaksana
Prioriitas Nasional Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)	Pengembangan Science dan Technopark Indonesia	Regulasi yang mendukung inovasi	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang pembangunan sumber daya manusia	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang pembangunan sumber daya manusia yang sesuai standar	1 Laporan	Setwapres
Prioritas Nasional Konsolidasi Demokrasi dan efektifitas Diplomasi	Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan	Peningkatan Peran dalam Kerja Sama Teknik	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	Penyelenggaraan Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri	Terwujudnya koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri dan pelayanan administrasi perjalanan dinas luar negeri yang cepat dan tepat	Persentase pelaksanaan Program Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan (KTSS) Indonesia	10 s.d. 20 peserta asing per pelatihan, 14 pelatihan	Setneg

3. Tahun 2018-2019

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, maka mulai tahun 2018 dilakukan pemutakhiran dan sinkronisasi agar tidak ada perbedaan lagi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi.

Sinkronisasi dilakukan melalui Sistem Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). Data pemutakhiran sasaran dan indikator kinerja program tahun 2018 s.d. 2019 disajikan pada tabel berikut:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

Tabel 15
Sasaran dan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program (*Outcome*)		Indikator Kinerja Program	Target	
			2018	2019
1.	Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia	1. Persentase pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administator, dan Jabatan Pengawas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan	92	92
		2. Indeks kepuasan layanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	3,4	3,4
		3. Indeks kepuasan peserta pendidikan dan pelatihan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	4.1	4.1
		4. Indeks peningkatan kompetensi peserta pasca pendidikan dan pelatihan	3.6	3.6
2.	Meningkatnya efektivitas organisasi, tata laksana dan akuntabilitas kinerja	1. Hasil evaluasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	100	100
		2. Persentase hasil evaluasi pelaksanaan proses bisnis di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan kategori Baik	100	100
		3. Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada seluruh satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan kategori AA (Sangat Memuaskan)	100	100
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada Menteri Sekretaris Negara di bidang perencanaan, keuangan, dan ketatausahaan	1. Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disampaikan kepada instansi terkait dengan tepat waktu	100	100
		2. Rata-rata indeks kepuasan pengguna layanan administrasi keuangan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	3.0	3.0
		3. Kualitas opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara	WTP	WTP
		4. Rata-rata indeks kepuasan pengguna layanan penatausahaan naskah dinas, dokumen/arsip di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	3.0	3.0
4.	Tersedianya layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang berkualita	Indeks kepuasan layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan kementerian Sekretariat Negara	3.0	3.0

Sasaran Program (*Outcome*)		Indikator Kinerja Program	Target	
			2018	2019
5.	Tersedianya layanan penyediaan sarana dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara dan pejabat negara yang berkualitas	1. Indeks kepuasan layanan penyediaan sarana dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara	3.0	3.0
		2. Indeks kepuasan layanan penyediaan sarana dan prasarana Pejabat Negara tertentu	3.0	3.0
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	1. Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti	100	100
		2. Persentase satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku	100	100
7.	Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden	1. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden	4.75	4.75
		2. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden	4.75	4.75
8.	Terselenggaranya dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan dengan baik dan lancar	Jumlah laporan manajemen dan pelayanan administrasi	1	1
9.	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Militer Presiden	Indeks kepuasan pengguna layanan di lingkungan Sekretariat Militer Presiden	3.85	3.85

b. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden

Tabel 16
Sasaran dan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program (*Outcome*)		Indikator Kinerja Program	Target	
			2018	2019
1.	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dan administrasi penanganan administrasi pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan pejabat lainnya	1. Persentase Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara	100	100
		2. Persentase Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara	100	100
		3. Persentase RKeppres tentang kenaikanpangkat, pemberhentian,dan pensiun ASN yang menduduki JPT Utama,JPT Madya,dan Jabatan Fungsional Jenjang Utama, serta alih status perwira tinggi TNI/Polri sebagai ASN yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara	100	100
2.	Meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi	1. Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara	100	100
		2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara	100	100
		3. Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan	100	100
3.	Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden dan /atau	Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti presiden, wakil	100	100

Sasaran Program (*Outcome*)		Indikator Kinerja Program	Target	
			2018	2019
	Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik	presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik		
4.	Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti	45	45
5.	Terselenggaranya hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Persentase pelayanan hubungan masyarakat terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar	100	100
6.	Meningkatnya efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kualitas pelayanan administrasi perjalanan dinas luar negeri	Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3	3
7.	Meningkatnya kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100	100
8.	Terselenggaranya kegiatan VVIP, dukungan administrasi personel TNI dan POLRI, dan penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan yang berkualitas	1. Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100	100
		2. Persentase pelayanan administrasi personel TNI dan POLRI yang disetujui oleh Presiden	100	100
		3. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100	100

B. Kerangka Pendanaan

Perencanaan kerangka pendanaan merupakan rincian strategi pendanaan program dan kegiatan yang disusun dalam perspektif jangka menengah pada RPJMN 2015-2019. Kebutuhan anggaran pada kerangka pendanaan Kementerian Sekretariat Negara bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan Satuan Kerja (Satker) Kementerian Sekretariat Negara, tetapi juga meliputi beberapa lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Kerangka pendanaan pada Bagian Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2015-2019
Kementerian Sekretariat Negara

(dalam jutaan rupiah)

Kode	Program	Satuan Kerja	Alokasi Anggaran Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Jumlah
007.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	Sekretariat Negara	356.881,43	360.260,74	801.439,14	692.580,78	715.732,36	2.926.894,45
		Sekretariat Presiden (5 Satker)	355.241,76	495.086,84	429.048,24	369.800,00	382.377,98	2.031.554,82
		Sekretariat Wakil Presiden	41.203,03	38.617,71	185.749,05	128.244,21	132.715,15	511.662,51
		Sekretariat Militer Presiden	7.639,48	6.714,19	6.789,68	6.600,00	6.827,60	34.570,95
		JUMLAH I	**760.965,70**	**900.679,48**	**1.423.026,11**	**1.197.225,00**	**1.237.653,09**	**5.513.682,73**
007.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara	Sekretariat Negara	555.740,30	821.768,41	-	-	-	1.377.508,71
		Sekretariat Wakil Presiden	50.937,57	49.479,61	-	-	-	100.417,18
		JUMLAH II	**606.677,86**	**871.248,03**	**-**	**-**	**-**	**1.477.925,89**
007.06	Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	Sekretariat Negara	212.459,79	22.010,28	21.012,16	16.770,09	17.357,04	289.609,36
		Sekretariat Presiden (5 Satker)	133.947,94	-	-	-	-	133.947,94
		Sekretariat Wakil Presiden	117.448,57	144.653,37	3.206,28	3.555,79	3.680,24	272.544,25
		Sekretariat Militer Presiden	23.787,76	23.712,65	22.460,32	28.400,00	29.394,00	127.754,73
		JUMLAH III	**487.644,05**	**190.376,30**	**46.678,76**	**48.725,88**	**50.431,29**	**823.856,28**
		JUMLAH I+II+III	**1.855.287,62**	**1.962.303,80**	**1.469.704,87**	**1.245.950,89**	**1.288.084,38**	**7.821.331,54**

Tabel . . .

Tabel 18
Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2015-2019
Lembaga Lain yang anggarannya dikoordinasikan
oleh Kementerian Sekretariat Negara

Kode	Program	Satuan Kerja	Alokasi Anggaran Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Jumlah
007.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	Pasukan Pengamanan Presiden	32.800,00	32.195,67	47.117,96	41.000,00	42.435,00	195.548,63
		Dewan Pertimbangan Presiden	41.000,00	41.521,50	34.800,00	40.000,00	41.385,04	198.706,54
		Unit Kerja Presiden Bidang P3	60.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60.916,60
		Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	148.000,00	82.929,36	74.589,00	80.000,00	83.940,62	467.905,88
		Komisi Hukum Nasional	12.342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,20
		Pusat Pengelolaan Komplek GBK	152.723,43	145.298,21	153.289,61	161.720,55	161.720,55	774.752,35
		Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran	155.575,32	232.183,10	188.096,05	230.251,40	230.251,40	1.036.357,27
		Kantor Staf Presiden	-	144.473,58	120.848,00	124.700,00	128.875,68	518.897,26
		JUMLAH	**591.015,35**	**678.786,40**	**618.740,62**	**677.671,94**	**688.608,28**	**3.253.269,50**

Struktur Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara) terdiri dari 7 unit organisasi dengan masing-masing Satuan Kerja (Satker) yang terdiri dari:

1. Sekretariat Negara, yang meliputi:
   a. Satker Sekretariat Negara;
   b. Satker Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno;
   c. Satker Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran;
2. Sekretariat Presiden, yang meliputi:
   a. Satker Istana Kepresidenan Jakarta;
   b. Satker Istana Kepresidenan Bogor;
   c. Satker Istana Kepresidenan Cipanas;
   d. Satker Istana Kepresidenan Yogyakarta;
   e. Satker Istana Kepresidenan Tampaksiring-Bali;

3. Sekretariat Wakil Presiden, yang meliputi Satker Sekretariat Wakil Presiden;
4. Sekretariat Militer Presiden, yang meliputi Satker Sekretariat Militer Presiden;
5. Pasukan Pengamanan Presiden, yang meliputi Satker Pasukan Pengamanan Presiden;
6. Dewan Pertimbangan Presiden, yang meliputi Satker Dewan Pertimbangan Presiden;
7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang meliputi Satker Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

BAB V
PENUTUP

Penyempurnaan Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 dilakukan untuk memenuhi dinamika yang berkembang di Kementerian Sekretariat Negara, agar pelayanan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara kepada Presiden dan Wakil Presiden terlaksana secara maksimal.

Selanjutnya, Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara yang telah mengakomodir perubahan dimaksud menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan bagi semua satker di Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah diamanatkan RPJMN 2015-2019.

Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara perlu dipahami seluruh jajaran Kementerian Sekretariat Negara agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam visi dan misi dapat tercapai.

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,
dan Akuntabilitas Kinerja,

Agussalim

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2015-2019

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

A. TAHUN 2015 - 2016

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
SATUAN KERJA SEKRETARIAT NEGARA						1.125.081,51	1.204.039,42	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA						356.881,43	360.260,74	
Sekretariat Kementerian						333.844,03	341.382,44	
	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada Menteri Sekretaris Negara di bidang perencanaan, keuangan, dan ketatausahaan	1 Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai dengan standar		100%	100%			
		2 Kualitas opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara		WTP	WTP			

3 Presentase . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
		3 Persentase penatausahaan naskah dinas, arsip, dan pelayanan keprotokolan sesuai standar		**100%**	**100%**			
	Tersedianya layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang berkualitas	**Persentase pelayanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi secara andal dan aman**		100%	100%			
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaporan dan evaluasi kegiatan serta dokumen lainnya terkait perencanaan dan penganggaran Kementerian Sekretariat Negara yang berkualitas	1 Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai dengan standar	Jakarta	100%	100%	1.285,89	1.410,57	Biro Perencanaan
		2 Persentase dokumen pelaporan dan evaluasi kegiatan yang disusun sesuai dengan standar		100%	100%			
		3 Persentase dokumen lainnya terkait perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai dengan standar		100%	100%			
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang transparan dan akuntabel	1 Persentase pelayanan pelaksanaan anggaran sesuai standar	Jakarta	100%	100%	318.872,38	308.354,17	Biro Keuangan
		2 Persentase tingkat keandalan laporan keuangan sesuai dengan peraturan		100%	100%			
Penyelenggaraan Acara/Keprotokolan, Ketatausahaan, dan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Terselenggaranya acara/keprotokolan, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang berkualitas	1 Persentase pelayanan acara/keprotokolan sesuai dengan standar	Jakarta	100%	100%	5.092,54	5.538,14	Biro Tata Usaha
		2 Persentase penatausahaan naskah dinas Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar		100%	100%			
		3 Persentase arsip/dokumen yang diamankan sesuai dengan standar		100%	100%			
Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Terselenggaranya layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi secara andal dan aman	1 Persentase kepuasan pengunjung portal nasional (http://www.indonesia.go.id) dan website http://www.setneg.go.id	Jakarta	100%	100%	8.593,22	26.079,56	Biro Informasi dan Teknologi
		2 Persentase sosialisasi dan penerapan aplikasi-aplikasi sistem pendukung perumusan kebijakan dan otomasi perkantoran		100%	100%			
		3 Persentase ketersediaan layanan infrastruktur komunikasi data dan informasi		100%	100%			

Deputi . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
Deputi Bidang Administrasi Aparatur						**21.713,41**	**17.263,89**	
	1 Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengelolaan SDM serta pelayanan administrasi kepegawaian	**Persentase pegawai yang menduduki jabatan sesuai dengan standar kompetensi jabatan**		**50%**	**60%**			
	2 Meningkatnya efektivitas organisasi, tata laksana dan akuntabilitas kinerja	**1 Persentase penyelesaian evaluasi dan analisis organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara**		**100%**	**100%**			
		2 Persentase penyusunan/penyempurnaan dan evaluasi dokumen di bidang ketatalaksanaan		**100%**	**100%**			
		3 Persentase satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang mendapatkan nilai capaian kinerja "Memuaskan"		**35%**	**40%**			
Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia serta pelayanan administrasi kepegawaian	1 Jumlah dokumen formasi yang disusun sesuai ketentuan	Jakarta	1 Dokumen	1 Dokumen	9.720,47	3.300,08	Biro Sumber Daya Manusia
		2 Jumlah laporan kegiatan pengadaan seleksi CPNS Kemensetneg		1 Laporan	1 Laporan			
		3 Jumlah laporan kegiatan pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan		1 Laporan	1 Laporan			
		4 Jumlah laporan kegiatan penyelesaian kenaikan pangkat ASN		1 Laporan	1 Laporan			
		5 Jumlah laporan kegiatan penyelesaian pemberhentian/pensiun pegawai		1 Laporan	1 Laporan			
		6 Jumlah laporan kegiatan penilaian kompetensi pejabat/pegawai		1 Laporan	1 Laporan			
		7 Jumlah laporan kegiatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan		1 Laporan	1 Laporan			
		8 Jumlah laporan kegiatan koordinasi penilaian, monitoring, dan pelaporan kinerja pegawai		1 Laporan	1 Laporan			

9. Jumlah . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
		9 Jumlah Laporan kegiatan penyelesaian administrasi kepegawaian Kementerian Sekretariat Negara		9 Laporan	9 Laporan			
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kementerian Sekretariat Negara	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan SDM yang profesional	1 Persentase penyelenggaraan diklat sesuai standar	Jakarta	100%	100%	11.101,17	13.081,15	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
		2 Persentase peserta diklat yang memperoleh sertifikat		85%	85%			
		3 Jumlah penerima beasiswa rintisan gelar		14 Orang	20 Orang			
		4 Jumlah program diklat yang terakreditasi		1 Laporan	1 Laporan			
		5 Jumlah kurikulum dan modul diklat		1 Buku	1 Buku			
		6 Jumlah widyaiswara yang kompeten sesuai kebutuhan organisasi		6 Orang	6 Orang			
		7 Persentase dukungan kegiatan kediklatan		100%	100%			
Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan serta Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sekretariat Negara	Meningkatnya efektivitas organisasi dan tata laksana serta akuntabilitas kinerja	1 Persentase penyelesaian dokumen evaluasi dan analisis organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Jakarta	100%	100%	891,76	882,67	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja
		2 Persentase penyelesaian dokumen evaluasi analisis jabatan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		100%	100%			
		3 Persentase penyusunan/penyempurnaan dan evaluasi dokumen di bidang ketatalaksanaan		100%	100%			
		4 Persentase satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang mendapatkan nilai capaian kinerja "SANGAT BAIK"		60%	70%			
Inspektorat						**1.324,00**	**1.614,40**	
	Meningkatnya kualitas pengawasan	**Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai standar**		**100%**	**100%**			

Penyelenggaraan . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
Penyelenggaraan Pengawasan Kementerian Sekretariat Negara	Terselenggaranya pengawasan sesuai ketentuan	1 Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti	Jakarta	100%	100%	1.324,00	1.614,40	Inspektorat
		2 Persentase satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan		100%	100%			
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA						**555.740,30**	**821.768,41**	
Sekretariat Kementerian						**555.740,30**	**821.768,41**	
	Tersedianya layanan penyediaan sarana dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara dan pejabat negara yang berkualitas	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara dan Pejabat Negara sesuai dengan standar**		**100%**	**100%**			
Penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana serta pelayanan umum lainnya Kementerian Sekretariat Negara	Tersedianya sarana dan prasarana kantor, rumah jabatan pejabat negara, wisma, serta pelayanan umum lainnya yang berkualitas	1 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara yang sesuai dengan standar	Jakarta	100%	100%	555.740,30	821.768,41	Biro Umum
		2 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Pejabat Negara yang sesuai dengan rencana		100%	100%			
		3 Persentase Laporan pengelolaan BMN milik Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan ketentuan		100%	100%			
		4 Mutu pelayanan kesehatan		100%	100%			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN						**212.459,79**	**22.010,28**	
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan						**1.703,98**	**3.261,74**	
	Terselenggaranya izin prakarsa, analisis dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi	**1 Persentase penyelesaian hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi sesuai standar**		**100%**	**100%**			

2. Persentase . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
		2 Persentase penyelesaian administratif Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disampaikan/disahkan/ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan standar		**100%**	**100%**			
	2 Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara	**2 Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti sesuai dengan standar**		**100%**	**100%**			
Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian	Tersedianya izin prakarsa, analisis dan penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, RInpres, dan otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres di bidang perekonomian	1 Persentase penyelesaian laporan hasil analisis RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, RInpres, dan otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres di bidang perekonomian sesuai dengan standar	Jakarta	100%	100%		518,88	Asisten Deputi Bidang Perekonomian
		2 Persentase penyelesaian administratif RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, RInpres, dan otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres di bidang perekonomian yang akan disampaikan/disahkan/ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan standar		100%	100%			
Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian RUU, RPerpu dan RPP serta Evaluasi Pelaksanaan UU, Perpu, dan PP Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri			Jakarta	100%	100%	233,45		
Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Tersedianya izin prakarsa, analisis dan penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, RInpres, dan otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres di bidang politik, hukum, dan keamanan	1 Persentase penyelesaian laporan hasil analisis RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, RInpres, dan otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres di bidang politik, hukum, dan keamanan sesuai dengan standar	Jakarta	100%	100%		488,06	Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

2. Persentase . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
		2 Persentase penyelesaian administratif RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, RInpres, dan otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres di bidang politik, hukum, dan keamanan yang akan disampaikan/disahkan/ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan standar		100%	100%			
Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian RUU, RPerpu dan RPP serta Evaluasi Pelaksanaan UU, Perpu, dan PP Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat			Jakarta	100%	100%	193,32		
Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah	Tersedianya izin prakarsa, analisis dan penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, RInpres, dan otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah	1 Persentase penyelesaian laporan hasil analisis RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, RInpres, dan otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah sesuai dengan standar	Jakarta	100%	100%	-	315,47	Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
		2 Persentase penyelesaian administratif RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, RInpres, dan otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah yang akan disampaikan/disahkan/ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan standar		100%	100%			
Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Tersedianya izin prakarsa, analisis dan penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, RInpres, dan otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	1 Persentase penyelesaian laporan hasil analisis RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, RInpres, dan otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan sesuai dengan standar	Jakarta	100%	100%	-	391,73	Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		2 Persentase penyelesaian administratif RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, RInpres, dan otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang akan disampaikan/disahkan/ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan standar		100%	100%			

Pelaksanaan . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
Pelaksanaan Analisis dan Administrasi di Bidang Litigasi dan Bantuan Hukum, Ekstradisi, Prerogatif dan Naturalisasi, serta Pengadministrasian Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya analisis izin prakarsa RUU dan RPerpres mengenai pengesahan perjanjian internasional dan penyelesaian pendapat hukum di bidang litigasi dan bantuan hukum, ekstradisi, prerogatif dan naturalisasi, serta pengadministrasian Peraturan Perundang-undangan	1 Persentase penyelesaian analisis dan penyusunan pendapat hukum atas gugatan dan permohonan Hak Uji Materiil sesuai dengan standar	Jakarta	100%	100%	1.277,22	1.547,60	Asisten Deputi Bidang Hukum
		2 Persentase penyelesaian analisis dan penyusunan pendapat hukum atas bantuan hukum di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan permohonan perlindungan hukum yang ditindaklanjuti sesuai dengan standar		100%	100%			
		3 Persentase analisis dan penyelesaian RUU dan RPerpres pengesahan perjanjian internasional dan permohonan ekstradisi, permasalahan dalam perjanjian internasional, serta penyusunan pendapat hukum, dan penyelesaian di bidang prerogratif sesuai dengan standar		100%	100%			
		4 Persentase Pelaksanaan pengadministrasian Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan standar		100%	100%			
Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan						**1.862,88**	**5.514,90**	
	1 Terselenggaranya hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan antara Presiden dan /atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan standar	**1 Persentase dukungan hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat sesuai standar**		**100%**	**100%**			
	2 Terselenggaranya hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	**2 Persentase pelayanan hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sesuai standar**		**100%**	**100%**			

Pelaksanaan . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
Pelaksanaan Hubungan Dengan Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural dan Lembaga Daerah	Terlaksananya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, dan lembaga daerah	Persentase dukungan hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga non struktural, dan lembaga daerah yang dilaksanakan sesuai dengan standar	Jakarta	100%	100%		832,59	Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah
Pelaksanaan Hubungan Dengan Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural		Persentase dukungan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara dan lembaga non struktural yang dilaksanakan sesuai dengan standar		100%	100%	291,72		
Pelaksanaan Hubungan Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik	Terlaksananya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik	Persentase dukungan hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang dilaksanakan sesuai dengan standar	Jakarta	100%	100%		1.670,74	Asisten Deputi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi
Pelaksanaan Hubungan Dengan Lembaga Daerah dan Organisasi Politik		Persentase dukungan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan Lembaga Daerah dan Organisasi Politik yang dilaksanakan sesuai dengan standar		100%	100%	81,14		
Pelaksanaan Hubungan Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	,	Persentase dukungan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan standar		100%	100%	401,67		
Penanganan Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara	Persentase penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti sesuai dengan standar	Jakarta	100%	100%	1.088,35	1.177,43	Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat
Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Tersedianya layanan kehumasan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Persentase pelayanan kehumasan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar	Jakarta	100%	100%	-	1.834,14	Asisten Deputi Hubungan Masyarakat

Deputi . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
Deputi Bidang Administrasi Aparatur						**2.189,68**	**2.579,48**	
	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dan administrasi penanganan administrasi pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan pejabat lainnya	**Persentase penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang diajukan kepada Presiden**		**100%**	**100%**			
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pejabat Negara serta Administrasi Lainnya yang berkaitan Dengan Pejabat Negara	Meningkatnya kecepatan, ketepatan, dan keakuratan penanganan administrasi pejabat negara dan pejabat lainnya	1 Persentase penyelesaian Rancangan dan otentifikasi Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya sesuai dengan standar	Jakarta	100%	100%	-	1.853,03	Biro Administrasi Pejabat Negara
		2 Persentase pelayanan administrasi dan informasi pejabat negara dan pejabat lainnya		100%	100%			
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pejabat Pemerintahan serta Administrasi Lainnya yang berkaitan dengan Pejabat Pemerintahan	Meningkatnya kecepatan, ketepatan, dan keakuratan penanganan administrasi pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya	1 Persentase penyelesaian Rancangan dan otentifikasi Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya sesuai dengan standar	Jakarta	100%	100%	-	726,45	Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan
		2 Persentase pelayanan administrasi pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya		100%	100%			
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pejabat Negara serta Administrasi Lainnya yang berkaitan Dengan Pejabat Negara		Persentase penyelesaian Rancangan dan otentifikasi Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya sesuai dengan standa		100%	100%	2.189,68		
		Persentase pelayanan Administrasi dan informasi pejabat negara dan pejabat lainnya		100%	100%			

Deputi . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan						**589,93**	-	
				100%	**100%**			
Dukungan Kebijakan Dalam Negeri		Persentase dukungan kebijakan dalam negeri kepada Deputi Bidang Dukungan Kebijakan/Menteri Sekretaris Negara sesuai standar	Jakarta	100%	100%	45,55		
Dukungan Kebijakan Hubungan Internasional		Persentase dukungan kebijakan bidang hubungan internasional kepada Deputi Bidang Dukungan Kebijakan/Mensesneg sesuai standar	Jakarta	100%	100%	119,27		
Dukungan Penyiapan, Penerjemahan dan Pencatatan Naskah/Surat/Produk Resmi Kenegaraan dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Penerjemah		Persentase naskah dokumen Kepresidenan/Kenegaraan dan terjemahan yang diselesaikan sesuai standar	Jakarta	100%	100%	425,12		
		Persentase pejabat fungsional penerjemah yang dibina sesuai dengan standar kompetensi jabatan		100%	100%			

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
Sekretariat Kementerian						**206.113,31**	**10.654,16**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kerja sama teknik luar negeri	**Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri dan kerja sama teknik luar negeri yang diselesaikan sesuai dengan standar**		**100%**	**100%**			
Penyelenggaraan Koordinasi Kerjasama Teknik Luar Negeri	Terselenggaranya Kerja Sama Teknik Luar Negeri dan program Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan dan Triangular yang cepat, tepat, dan aman	1 Persentase penyelesaian dokumen kerja sama teknik meliputi proyek, tenaga ahli, dan beasiswa serta perjalanan dinas luar negeri sesuai standar	Jakarta	100%	100%	206.113,31	10.654,16	Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri
		2 Persentase rekomendasi fasilitas kerja sama teknik meliputi keimigrasian, perpajakan, kepabeanan dan kendaraan yang diterbitkan sesuai standar		100%	100%			
		3 Persentase sosialisasi kerja sama teknik luar negeri		100%	100%			
		4 Persentase rakor dan monev pelaksanaan kerja sama teknik		100%	100%			
		5 Persentase pelaksanaan Program Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia		100%	100%			
		6 Persentase tersedianya dukungan kesekretariatan penerimaan kepala negara/pemerintahan pada penyelenggaraan sidang/konferensi internasional di Indonesia		100%	100%			

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
UNIT ORGANISASI SEKRETARIAT PRESIDEN						**489.189,70**	**495.086,84**	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA						**355.241,76**	**495.086,84**	
Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana						**355.241,76**	**417.378,62**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan kerumahtanggaan kepada Presiden	**Persentase kelancaran dukungan kerumahtanggaan kepada Presiden**		**100%**	**100%**			
Pelaksanaan Tugas Administrasi Kesekretariatan	Terselenggaranya dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai standar	Persentase dukungan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan ketatausahaan yang sesuai standar	Jakarta	100%	100%	95.731,76	157.274,90	Biro Administrasi
Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Jakarta	Terselenggaranya dukungan jamuan, pengelolaan seni budaya dan tata graha, peralatan dan penataan lingkungan, serta kerumahtanggaan lainnya yang sesuai standar	Persentase dukungan pelaksanaan jamuan, pengelolaan seni budaya dan tata graha, peralatan dan penataan lingkungan, serta kerumahtanggaan lainnya yang sesuai standar	Jakarta	100%	100%	89.616,00	68.433,28	Biro Pengelolaan Istana
Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Bogor	Terselenggaranya dukungan administrasi dan kerumahtanggaan Istana Kepresidenan Bogor yang sesuai standar	Persentase dukungan administrasi dan kerumahtanggaan Istana Kepresidenan Bogor yang sesuai standar	Jawa Barat	100%	100%	26.896,00	30.240,00	Istana Kepresidenan Bogor
Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Cipanas	Terselenggaranya dukungan administrasi dan kerumahtanggaan Istana Kepresidenan Cipanas yang sesuai standar	Persentase dukungan administrasi dan kerumahtanggaan Istana Kepresidenan Cipanas yang sesuai standar	Jawa Barat	100%	100%	19.898,00	20.790,34	Istana Kepresidenan Cipanas
Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Yogyakarta	Terselenggaranya dukungan administrasi dan kerumahtanggaan Istana Kepresidenan Yogyakarta yang sesuai standar	Persentase dukungan administrasi dan kerumahtanggaan Istana Kepresidenan Yogyakarta yang sesuai standar	DIY	100%	100%	27.832,00	29.124,00	Istana Kepresidenan Yogyakarta

Penyelenggaraan . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Tampaksiring	Terselenggaranya dukungan administrasi dan kerumahtanggaan Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali yang sesuai standar	Persentase dukungan administrasi dan kerumahtanggaan Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali yang sesuai standar	Bali	100%	100%	20.284,00	20.326,00	Istana Kepresidenan Tampaksiring
Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Istana Kepresidenan	Terselenggaranya dukungan pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana serta dukungan umum lainnya yang berkualitas	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan umum lainnya yang sesuai standar	Jakarta	100%	100%	74.984,00	91.190,10	Biro Umum
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media						-	**77.708,22**	
	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas Presiden melalui dukungan keprotokolan	**Persentase dukungan teknis dan administrasi keprotokolan yang sesuai dengan standar**		**100%**	**100%**			
Penyelenggaraan Dukungan Pers Media dan Informasi	Terselenggaranya dukungan pers, media, dan informasi yang berkualitas	Persentase dukungan pers, media, dan informasi yang sesuai standar	Jakarta	100%	100%	-	5.514,60	Biro Pers, Media dan Informasi
Penyelenggaraan Keprotokolan	Terselenggaranya dukungan keprotokolan yang sesuai standar	Persentase dukungan keprotokolan untuk kegiatan kenegaraan/resmi, Tamu Negara, dan kegiatan penting lainnya yang sesuai standar	Jakarta	100%	100%	-	72.193,62	Biro Protokol
PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN						**133.947,94**	-	
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media						**133.947,94**	-	
	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas Presiden melalui dukungan keprotokolan	**Persentase dukungan teknis dan administrasi keprotokolan yang sesuai dengan standar**		**100%**	**100%**			
Penyelenggaraan Dukungan Pers Media dan Informasi	Terselenggaranya dukungan pers, media, dan informasi yang berkualitas	Persentase dukungan pers, media, dan informasi yang sesuai standar	Jakarta	100%	100%	12.333,90		Biro Pers, Media dan Informasi
Penyelenggaraan Keprotokolan	Terselenggaranya dukungan keprotokolan yang sesuai standar	Persentase dukungan keprotokolan untuk kegiatan kenegaraan/resmi, Tamu Negara, dan kegiatan penting lainnya yang sesuai standar	Jakarta	100%	100%	121.614,04		Biro Protokol

SATUAN . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
SATUAN KERJA SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN						**209.589,17**	**232.750,70**	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA						**41.203,03**	**38.617,71**	
Deputi Bidang Administrasi						**41.203,03**	**38.617,71**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dan manajemen administrasi kepada Wakil Presiden di bidang perencanaan, keuangan, dan ketatausahaan	**1 Persentase perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan dan manajemen kinerja yang disusun sesuai dengan standar**		**100%**	**100%**			
		2 Persentase penatausahaan pimpinan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan pelayanan kesehatan sesuai standar		**100%**	**100%**			
Pelaksanaan Dukungan Perencanaan Anggaran, Keuangan dan Manajemen Kinerja	Terlaksananya perencanaan dan evalusi penganggaran, pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan dan akuntansi Barang Milik negara serta manajemen kinerja Sekretariat Wakil Presiden yang berkualitas	1 Persentase perencanaan dan evaluasi anggaran sesuai dengan standar	Jakarta	100%	100%	25.808,55	23.835,86	Biro Perencanaan dan Keuangan
		2 Persentase pengelolaan keuangan sesuai dengan standar		100%	100%			
		3 Persentase pelaporan akuntansi dan barang milik negara sesuai dengan standar		100%	100%			
		4 Persentase pelaksanaan manajemen kinerja sesuai dengan standar		-	100%			
Pelaksanaan Dukungan Tata Usaha, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Kepegawaian	Terlaksananya urusan ketatausahaan, pengelolaan teknologi informasi, dan kepegawaian, pengoordinasian evaluasi organisasi dan tatalaksana serta pelayanan kesehatan pejabat dan pegawai Sekretariat Wakil Presiden yang berkualitas	1 Persentase urusan ketatausahaan sesuai standar	Jakarta	100%	100%	8.227,47	8.256,45	Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi dan Kepegawaian
		2 Persentase pengelolaan teknologi informasi sesuai standar		100%	100%			
		3 Persentase pengelolaan kepegawaian dan tatalaksana sesuai standar		100%	100%			
		4 Persentase layanan kesehatan sesuai standar		100%	100%			

Pelaksanaan . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
Pelaksanaan Dukungan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya dukungan kesekretariatan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang berkualitas	Persentase dukungan kesekretariatan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan standar		100%	-	7.167,01	6.525,40	Sekretariat TNP2K
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA						**50.937,57**	**49.479,62**	
Deputi Bidang Administrasi						**50.937,57**	**49.479,62**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan sarana dan prasarana bagi Wakil Presiden	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana bagi Wakil Presiden sesuai dengan standar**		**100%**	**100%**			
Pelaksanaan Dukungan Sarana dan Prasarana Sekretariat Wakil Presiden	Tersedianya sarana dan prasarana Sekretariat Wakil Presiden yang berkualitas	1 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana gedung dan bangunan yang sesuai dengan standar	Jakarta	100%	100%	50.937,57	49.479,62	Biro Umum
		2 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perlengkapan yang sesuai dengan standar		100%	100%			
		3 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kendaraan dan penyelenggaraan ketertiban keamanan dalam yang sesuai dengan standar		100%	100%			
		4 Persentase pengelolaan perpustakaan sesuai standar		100%	100%			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN						**117.448,57**	**144.653,37**	
Deputi Bidang Administrasi						**109.660,05**	**136.540,77**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan keprotokolan dan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	**1 Persentase kelancaran dukungan pemberian pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden**		100%	100%			
		2 Persentase kelancaran dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden		100%	100%			

Pelaksanaan . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
Pelaksanaan Dukungan Keprotokolan dan Kerumahtanggaan Wakil Presiden	Terlaksananya dukungan keprotokolan, persidangan, kerumahtanggaan, perjalanan, penerbitan media massa, pengelolaan naskah pidato/notulen dan penerjemahan bagi Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden yang berkualitas	1 Persentase dukungan keprotokolan kepada Wakil Presiden sesuai standar	Jakarta	100%	100%	109.660,05	136.540,77	- 2015 oleh Biro Protokol dan Kerumahtanggaan
		2 Persentase dukungan kerumahtanggan kepada Wakil Presiden sesuai standar		100%	100%			- 2016 oleh Biro Protokol
		3 Persentase dukungan kerumahtanggaan kepada Sekretariat Wakil Presiden sesuai standar		100%	100%			
Deputi Seswapres Bidang Politik[4])						**2.350,10**	-	
	Tersedianya rekomendasi hasil kajian di bidang kebijakan bagi Wakil Presiden yang efektif	**Persentase rekomendasi hasil kajian di bidang kebijakan yang disetujui oleh Wakil Presiden**		**100%**	**100%**			
Penyelenggaraan dukungan kebijakan Wakil Presiden bidang Hubungan Internasional	Terlaksananya dukungan kebijakan di Bidang Hubungan Internasional	Jumlah laporan hasil analisisi kebijakan dibidang hubungan internasional	Jakarta	1 lap	1 lap	394,69	-	Asisten Deputi Hubungan Internasional
		Jumlah laporan hasil pengamantan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan internasional						
		Jumlah laporan hasil perencanaan kinerja dan evaluasi kegiatan dibidang hubungan internasional						
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Pemerintahan dan Politik dalam Negeri	Terlaksananya dukungan kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri	Jumlah laporan hasil analisisi kebijakan dibidang Pemerintahan dan Politik dalam Negeri	Jakarta	1 lap	1 lap	463,07	-	Asisten Deputi Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri
		Jumlah laporan hasil pengamantan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Politik dalam Negeri						

Jumlah . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
		Jumlah laporan hasil perencanaan kinerja dan evaluasi kegiatan dibidang Pemerintahan dan Politik dalam Negeri						
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Kebijakan Hukum dan HAM	Terlaksananya dukungan kebijakan di Bidang Kebijakan Hukum dan HAM	Jumlah laporan hasil analisisi kebijakan dibidang Kebijakan Hukum dan HAM	Jakarta	1 lap	1 lap	347,19	-	Asisten Deputi Kebijakan Hukum dan HAM
		Jumlah laporan hasil pengamantan pelaksanaan kebijakan di bidang Kebijakan Hukum dan HAM						
		Jumlah laporan hasil perencanaan kinerja dan evaluasi kegiatan dibidang Kebijakan Hukum dan HAM						
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Komunikasi Politik	Terlaksananya dukungan kebijakan di Bidang Komunikasi Politik	Jumlah laporan hasil analisisi kebijakan dibidang komunikasi politik	Jakarta	1 lap	1 lap	443,43	-	Asisten Deputi Komunikasi Politik
		Jumlah laporan hasil pengamantan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi politik						
		Jumlah laporan hasil perencanaan kinerja dan evaluasi kegiatan dibidang komunikasi politik						
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Dokumentasi dan Diseminasi Informasi	Terlaksananya dukungan kebijakan di Bidang dokumentasi dan diseminasi informasi	Jumlah laporan hasil analisisi kebijakan dibidang dokumentasi dan diseminasi informasi	Jakarta	1 lap	1 lap	701,73	-	Asisten Deputi Dokumentasi dan Diseminasi Informasi
		Jumlah laporan hasil pengamantan pelaksanaan kebijakan di bidang dokumentasi dan diseminasi informasi						

Jumlah . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
		Jumlah laporan hasil perencanaan kinerja dan evaluasi kegiatan dibidang dokumentasi dan diseminasi informasi						
		Jumlah laporan hasil dokumentasi dan diseminasi informasi kegiatan Wakil Presiden dan Sekretariat Wakil Presiden						
Deputi Seswapres Bidang Ekonomi[4])						**2.223,02**	-	
	Tersedianya rekomendasi hasil kajian di bidang kebijakan bagi Wakil Presiden yang efektif	**Persentase rekomendasi hasil kajian di bidang kebijakan yang disetujui oleh Wakil Presiden**		**100%**	**100%**			
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Program Ekonomi Khusus	Terlaksananya dukungan kebijakan di Bidang Program Ekonomi Khusus	Jumlah laporan hasil analisisi kebijakan dibidang Program Ekonomi Khusus	Jakarta	1 lap	1 lap	548,08	-	Asisten Deputi Program Ekonomi Khusus
		Jumlah laporan hasil pengamantan pelaksanaan kebijakan di bidang Program Ekonomi Khusus						
		Jumlah laporan hasil perencanaan kinerja dan evaluasi kegiatan dibidang Program Ekonomi Khusus						
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Perdagangan, Pariwisata dan Kerja Sama Internasional	Terlaksananya dukungan kebijakan di Bidang Perdagangan, Pariwisata	Jumlah laporan hasil analisisi kebijakan dibidang Perdagangan, Pariwisata dan Kerja Sama Internasional	Jakarta	1 lap	1 lap	563,70	-	Asisten Deputi Perdagangan dan Pariwisata
		Jumlah laporan hasil pengamantan pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan, Pariwisata dan Kerja sama Internasional						

Jumlah . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
		Jumlah laporan hasil perencanaan kinerja dan evaluasi kegiatan dibidang Perdagangan, Pariwisata dan Kerja sama Internasional						
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Industri dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya dukungan kebijakan di Bidang Industri dan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan hasil analisisi kebijakan dibidang Industri dan Sumber Daya Alam	Jakarta	1 lap	1 lap	516,95	-	Asisten Deputi Industri dan Sumber Daya Alam
		Jumlah laporan hasil pengamantan pelaksanaan kebijakan di bidang Industri dan Sumber Daya Alam						
		Jumlah laporan hasil perencanaan kinerja dan evaluasi kegiatan dibidang Industri dan Sumber Daya Alam						
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Infrastruktur dan Energi	Terlaksananya dukungan kebijakan di Bidang Infrastruktur dan Energi	Jumlah laporan hasil analisisi kebijakan dibidang infrastruktur dan energi	Jakarta	1 lap	1 lap	594,29	-	Asisten Deputi Infrastruktur dan Energi
		Jumlah laporan hasil pengamantan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan energi						
		Jumlah laporan hasil perencanaan kinerja dan evaluasi kegiatan dibidang infrastruktur dan energi						
Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan*)						**1.675,28**	-	
	Tersedianya rekomendasi hasil kajian di bidang kebijakan bagi Wakil Presiden yang efektif	**Persentase rekomendasi hasil kajian di bidang kebijakan yang disetujui oleh Wakil Presiden**		**100%**	**100%**			

Penyelenggaraan . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berbasis Keluarga	Terlaksananya dukungan kebijakan di Bidang Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berbasis Keluarga	Jumlah laporan hasil analisisi kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat berbasis keluarga	Jakarta	1 lap	1 lap	549,46	-	Asisten Deputi Kesejahteraan Rakyat Berbasis Keluarga
		Jumlah laporan hasil pengamantan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat berbasis keluarga						
		Jumlah laporan hasil perencanaan kinerja dan evaluasi kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat berbasis keluarga						
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berbasis Komunitas	Terlaksananya dukungan kebijakan di Bidang Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berbasis Komunitas	Jumlah laporan hasil analisisi kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat berbasis komunitas	Jakarta	1 lap	1 lap	579,96	-	Asisten Deputi Kesejahteraan Rakyat Berbasis Komunitas
		Jumlah laporan hasil pengamantan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat berbasis komunitas						
		Jumlah laporan hasil perencanaan kinerja dan evaluasi kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat berbasis komunitas						
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berbasis Usaha	Terlaksananya dukungan kebijakan di BidangPeningkatan Kesejahteraan Rakyat Berbasis Usaha	Jumlah laporan hasil analisisi kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat berbasis usaha	Jakarta	1 lap	1 lap	545,86	-	Asisten Deputi Kesejahteraan Rakyat Berbasis Usaha
		Jumlah laporan hasil pengamantan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat berbasis usaha						
		Jumlah laporan hasil perencanaan kinerja dan evaluasi kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat berbasis usaha						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
Deputi Seswapres Bidang Tata Kelola Pemerintahan*)						**1.540,11**	**2.133,00**	
	Tersedianya rekomendasi hasil kajian di bidang kebijakan bagi Wakil Presiden yang efektif	**Persentase rekomendasi hasil kajian di bidang kebijakan yang disetujui oleh Wakil Presiden**		**100%**	**100%**			
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya dukungan kebijakan di Bidang Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil analisisi kebijakan dibidang penyelenggaraan reformasi birokrasi	Jakarta	1 lap	1 lap	519,62	-	Asisten Deputi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
		Jumlah laporan hasil pengamantan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan reformasi birokrasi						
		Jumlah laporan hasil perencanaan kinerja dan evaluasi kegiatan dibidang penyelenggaraan reformasi birokrasi						
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Penyelenggaraan Pengawasan Intern Pemerintah	Terlaksananya dukungan kebijakan di Bidang Penyelenggaraan Pengawasan Intern Pemerintah	Jumlah laporan hasil analisis kebijakan dibidang pengawasan internal pemerintah	Jakarta	1 lap	1 lap	516,38	-	Asisten Deputi Pengawasan Intern Pemerintah
		Jumlah laporan hasil pengamantan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan internal pemerintah						
		Jumlah laporan hasil perencanaan kinerja dan evaluasi kegiatan dibidang pengawasan internal pemerintah						
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Terlaksananya dukungan kebijakan di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah laporan hasil analisis kebijakan dibidang Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jakarta	1 lap	1 lap	504,11	-	Asisten Deputi Pelayanan Publik

Jumlah . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
		Jumlah laporan hasil pengamantan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Publik						
		Jumlah laporan hasil perencanaan kinerja dan evaluasi kegiatan dibidang Penyelenggaraan Pelayanan Publik						
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan						-	**2.133,00**	
	Meningkatnya kualitas analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan kepada Wakil Presiden	**Persentase analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden**		**100%**	**100%**			
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Peningkatan dan Pengembangan Kesejahteraan	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang peningkatan dan pengembangan kesejahteraan	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang peningkatan dan pengembangan kesejahteraan yang sesuai standar	Jakarta	100%	100%	-	702,00	Asisten Deputi Peningkatan dan Pengembangan Kesejahteraan
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang perlindungan sosial dan penanggulangan bencana	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang perlindungan sosial dan penanggulangan bencana yang sesuai standar	Jakarta	100%	100%	-	729,90	Asisten Deputi Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang pembangunan sumber daya manusia	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang pembangunan sumber daya manusia yang sesuai standar	Jakarta	100%	100%	-	701,10	Asisten Deputi Pembangunan Sumber Daya Manusia

Deputi . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan						-	**3.051,90**	
	Meningkatnya kualitas analisis kebijakan di bidang pemerintahan kepada Wakil Presiden	**Persentase analisis kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden**		**100%**	**100%**			
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai standar	Jakarta	100%	100%	-	578,70	Asisten Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang sesuai standar	Jakarta	100%	100%	-	673,20	Asisten Deputi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang hubungan luar negeri	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang hubungan luar negeri yang sesuai standar	Jakarta	100%	100%	-	487,80	Asisten Deputi Hubungan Luar Negeri
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan yang sesuai standar	Jakarta	100%	100%	-	572,40	Asisten Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang komunikasi dan informasi publik	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang komunikasi dan informasi publik yang sesuai standar	Jakarta	100%	100%	-	739,80	Asisten Deputi Komunikasi dan Informasi Publik

Deputi . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman						-	**2.927,70**	
	Meningkatnya kualitas analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman kepada Wakil Presiden	**Persentase analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden**		**100%**	**100%**			
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang keuangan, investasi, dan badan usaha	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang keuangan, investasi, dan badan usaha yang sesuai standar	Jakarta	100%	100%	-	713,70	Asisten Deputi Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha
Asisten Deputi Bidang Industri, Perdagangan, Pariwisata dan, Ekonomi Kreatif	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang Industri, Perdagangan, Pariwisata dan, Ekonomi Kreatif	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang Industri, Perdagangan, Pariwisata dan, Ekonomi Kreatif yang sesuai standar	Jakarta	100%	100%	-	747,00	Asisten Deputi Bidang Industri, Perdagangan, Pariwisata dan, Ekonomi Kreatif
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Hayati	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang ketahanan pangan dan sumber daya hayati	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang ketahanan pangan dan sumber daya hayati yang sesuai standar	Jakarta	100%	100%	-	660,60	Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Hayati
Asisten Deputi Bidang Infrastruktur, Energi, dan Tata Ruang	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang infrastruktur, energi, dan tata ruang	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang infrastruktur, energi, dan tata ruang yang sesuai standar	Jakarta	100%	100%	-	806,40	Asisten Deputi Bidang Infrastruktur, Energi, dan Tata Ruang

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
SATUAN KERJA SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN						**31.427,30**	**30.426,84**	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA						**7.639,50**	**6.714,19**	
Sekretaris Militer Presiden						**7.639,50**	**6.714,19**	
	Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Militer Presiden	**Indeks kepuasan pengguna layanan di lingkungan Sekretariat Militer Presiden**		**3.75 (skala 5)**	**3.80 (skala 5)**			
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Militer Presiden	1 Dokumen Administrasi Umum	1 Persentase dokumen bidang administrasi umum yang diselesaikan sesuai standar	Jakarta	100%	100%	7.639,50	6.714,19	Biro Umum
	2 Layanan Perkantoran	2 Persentase layanan pimpinan, kepegawaian dan perkantoran yang dilaksanakan sesuai rencana		100%	100%			
	3 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	3 Persentase fasilitas kerja yang dapat disediakan sesuai rencana		100%	100%			
	4 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			100%	100%			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN						**23.787,80**	**23.712,65**	
Sekretaris Militer Presiden						**23.787,80**	**23.712,65**	
	Terselenggaranya kegiatan VVIP, dukungan administrasi personel TNI dan Polri, dan penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan	**1 Persentase dukungan pelayanan pengamanan VVIP yang terlaksana dengan lancar**		**100%**	**100%**			
		2 Persentase pelayanan administrasi TNI dan Polri yang disetujui oleh Presiden		**100%**	**100%**			
		3 Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden		**100%**	**100%**			

Pengkoordinasian . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
Pengkoordinasian Pengamanan Fisik dan Non Fisik bagi VVIP	1 Layanan Pengamanan VVIP yang terselenggara dengan tertib, aman, dan lancar	1 Persentase layanan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara sahabat (VVIP) sesuai Standar Pelayanan	Jakarta	100%	100%	3.625,20	2.945,76	Biro Pengamanan
	2 Kegiatan VVIP terselenggara dengan tertib, aman, dan lancar dalam Rangkaian Acara HUT RI	2 Persentase kegiatan pengamanan dalam rangkaian acara HUT RI yang terlaksana sesuai Rencana Garis Besar Kegiatan HUT RI		100%	100%			
Penyelenggaraan Dukungan Teknis dan Administrasi Personel TNI dan Polri	1 Rancangan Naskah Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengangkatan, Kenaikan Pangkat, dan Pemberhentian Personel TNI dan Polri	1 Persentase penyelesaian Rancangan Naskah Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang wewenang penetapannya berada pada Presiden sesuai standar pelayanan	Jakarta	100%	100%	1.982,60	1.734,94	Biro Personil TNI dan Polri
	2 Kegiatan Upacara Kenegaraan dan Pelantikan TNI/Polri yang kewenangannya berada pada Presiden	2 Persentase upacara kenegaraan dan pelantikan TNI/Polri yang kewenangannya berada pada Presiden yang dilaksanakan sesuai rencana		100%	100%			
	3 Personel TNI dan Polri di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan serta pembinaannya	3 Persentase personel TNI dan Polri di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan serta pembinaanya sesuai standar pelayanan		100%	100%			
Penyelenggaraan Administrasi Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	1 Rancangan Naskah Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	1 Persentase penyelesaian Rancangan Keppres tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sesuai Standar Pelayanan	Jakarta	100%	100%	18.180,00	19.031,95	Biro Gelar, Tanda Jasa dan Kehormatan
	2 Benda Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	2 Persentase ketersediaan benda gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan sesuai rencana		100%	100%			
	3 Rekomendasi pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	3 Persentase usulan pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang mendapatkan rekomendasi		100%	100%			
	4 Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan di daerah	4 Persentase pelaksanaan penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang dilaksanakan di daerah sesuai usulan		100%	100%			

SATUAN . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
SATUAN KERJA PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN						**32.800,00**	**32.195,67**	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA						**32.800,00**	**32.195,67**	
Pasukan Pengamanan Presiden						**32.800,00**	**32.195,67**	
	Peningkatan kualitas bidang inspektorat, perencanaan, intelijen, operasi, personel, dan dukungan umum logistik	**Persentase kegiatan dan kekuatan personel, jumlah kegiatan dan dukungan dalam pelaksanaan advance tim dan main grup**		**100%**	**100%**			
Perencanaan dan Penganggaran Paspampres	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran serta laporan evaluasi	Jakarta	100%	100%	553,52	619,58	Asisten Perencanaan
Pengawasan Internal Paspampres	Laporan Audit dan Review	Persentase temuan yang di tindaklanjuti dan laporan audit serta kegiatan reviu	Jakarta	100%	100%	247,38	281,47	Ir. Paspampres
Intelijen Paspampres	Dukungan Kegiatan Intelijen	Persentase kegiatan operasi intelijen, dan produk data intelijen	Jakarta	100%	100%	621,02	795,23	Asisten Intelijen
Operasi dan Latihan Paspampres	Operasi Pengamanan VVIP	Persentase volume kegiatan pengamanan VVIP yang terlaksana	Jakarta	100%	100%	1.143,98	1.295,43	Asisten Operasi
Personil dan Pengamanan Paspampres	Kegiatan Advance Tim dan Main Group	Presentase kekuatan personel, kegiatan, dan dukungan dalam pelaksanaan advance tim dan main grup	Jakarta	100%	100%	7.666,24	8.490,89	Asisten Personel
Dukungan Umum Logistik Paspampres	Dukungan Umum Logistik	Persentase dukungan perbekalan, materiil, fasilitas dan jasa serta dukungan anggaran yang memadai	Jakarta	0	100%	22.567,87	20.713,08	Asisten Logistik

SATUAN . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
SATUAN KERJA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN						**41.000,00**	**41.521,50**	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA						**41.000,00**	**41.521,50**	
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden						**41.000,00**	**41.521,50**	
	Terwujudnya dukungan data yang diolah dan informasi yang akurat yang disajikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden	**1 Jumlah data dan informasi yang dikelola dan disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden**		**100%**	**100%**			
		2 Jumlah Rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu		**100%**	**100%**			
		3 Persentase kegiatan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ysng mendapatkan Pelayanan Keprotokolan		**100%**	**100%**			
		4 Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan Pelayanan Persidangan		**100%**	**100%**			
Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi	Data yang diolah dan informasi yang disajikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden	1 Jumlah data dan informasi yang dikelola dan disampaikan kepada Anggota Dewan Pertimbangan Presiden	Jakarta	7 Dokumen	7 Dokumen	1.130,97	1.839,13	Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
		2 Jumlah rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu		100%	100%			

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
	Terwujudnya penyelenggaraan urusan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, serta pelayanan keprotokolan dan persidangan yang akuntabel kepada Dewan Pertimbangan Presiden	**1 Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan**		**100%**	**100%**			
		2 Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan		**100%**	**100%**			
Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden	Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, perencanaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, serta pelayanan keprotokolan dan persidangan	1 Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan	Jakarta	2 Dokumen	2 Dokumen	39.869,04	39.682,38	Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
		2 Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan		1 Dokumen	1 Dokumen			
		3 Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan		10 Dokumen	10 Dokumen			
		4 Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan		9 Dokumen	9 Dokumen			
		5 Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan		100%	100%			
		6 Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan		100%	100%			
		7 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan						
		8 Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa		100%	100%			

SATUAN . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2015	
SATUAN KERJA UNIT KEGIATAN PRESIDEN BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN					**60.916,60**	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA					**60.916,60**	
Sekretariat UKP-PPP					**60.916,60**	
	Terlaksananya Dukungan Teknis dan Administrasi kepada UKP-PPP	**1 Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan UKP-PPP**		**100%**		
		2 Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi UKP-PPP yang mendapatkan pelayanan		**100%**		
		3 Persentase ketersediaan perangkat dan koneksi jaringan komunikasi UKP-PPP dengan Kementerian/Lembaga		**100%**		
		4 Persentase dokumen administrasi perkantoran yang diselesaikan tepat waktu		**100%**		
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Sehingga Mencapai Sasaran Pembangunan Nasional Dengan Penyelesaian Penuh UKP-PPP	Tersusunnya laporan hasil kegiatan tim khusus/gugus tugas	1 Jumlah laporan hasil kegiatan tim khusus/gugus tugas	Jakarta	12 lap	60.916,60	Sekretariat UKP-PPP
	Tersusunnya rekomendasi kebijakan	2 Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan		12 lap		
	Tersusunnya dokumen perencanaan pengelolaan anggaran, serta laporan kegiatan dan pembinaan	3 Persentase terselenggaranya perencanaan pengelolaan anggaran,		100%		
	Terlaksananya layanan perkantoran sesuai standar	4 Persentase terlaksananya kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran dan gedung/bangunan		100%		
	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	5 Persentase ketersediaan jumlah sarana dan prasarana perkantoran		100%		

SATUAN . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana	K/L-E-E-NS-BS
				2015	2016	2015	2016		
SATUAN KERJA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN						**148.000,00**	**82.929,36**		
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA						**148.000,00**	**82.929,36**		
Sekretariat LPSK						**148.000,00**	**82.929,36**		
	Terciptanya layanan masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana	**Persentase pelaksanaan layanan masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban dan kegiatan pendukungnya yang sesuai ketentuan**		**100%**	**100%**				
Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban dan Dukungan Lainnya di Lingkungan LPSK	Terlaksananya dukungan kelembagaan dan pelayanan masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban pada proses peradilan pidana	1 Persentase pemberian perlindungan saksi dan atau korban yang sesuai ketentuan	Jakarta	100%	100%	148.000,00	82.929,36	Sekretariat LPSK	
		2 Persentase dukungan kelembagaan dalam pemberian perlindungan saksi dan atau korban		100%	100%				
		3 Persentase sarana dan prasarana yang mencukupi dalam mendukung kegiatan perlindungan saksi dan atau korban sesuai target yang ditetapkan		100%	100%				

SATUAN . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
				2016	2016	
SATUAN KERJA KANTOR STAF PRESIDEN					**144.473,58**	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA					**144.473,58**	
Sekretariat KSP					**144.473,58**	
	Terlaksananya Dukungan Teknis dan Administrasi kepada Kantor Staf Presiden	**1 Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan Kantor Staf Presiden**		**100%**		
		2 Persentase pelaksanaan kegiatan koordinasi Kantor Staf Presiden yang mendapatkan pelayanan		**100%**		
		3 Persentase ketersediaan perangkat dan koneksi jaringan komunikasi Kantor Staf Presiden dengan Kementerian/Lembaga		**100%**		
		4 Persentase dokumen administrasi perkantoran yang diselesaikan tepat waktu		**100%**		
Pemberian Dukungan Kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Melaksanakan Pengendalian Program-Program Prioritas Nasional, Komunikasi Politik, dan Pengelolaan Isu Strategis		1 Jumlah rekomendasi kebijakan yang diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan isu-isu strategis	Jakarta		144.473,58	Sekretariat KSP
		2 Persentase ketersediaan jumlah sarana dan prasarana perkantoran				
		3 Persentase terlaksananya layanan pembayaran gaji/tunjangan, serta operasional pemeliharaan perkantoran				
		4 Persentase terselenggaranya perencanaan pengelolaan anggaran serta pelaporan kegiatan dan pembinaan				

SATUAN . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
SATUAN KERJA BLU GELORA BUNG KARNO						**152.723**	**145.298**	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA								
BLU Gelora Bung Karno								
Pengelolaan dan penatausahaan keuangan di lingkungan PPKGBK	Terselenggaranya pengelolan, penatausahaan keuangan dan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta pengelolaan dan	Persentase dokumen perencanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai standar		100%	100%	56.591	59.800	
Peningkatan pembangunan dan pengembangan usaha di lingkungan PPKGBK	Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan usaha di lingkungan PPKGBK sesuai standar	Persentase penyelenggaraan perencanaan, pembangunan dan pengembangan usaha di lingkungan PPKGBK Sesuai standar		100%	100%	47.177	34.498	
Pengelolaan dan penatausahaan kepegawaian, hukum, humas, dan kerumahtanggaan di lingkungan PPKGBK	Terselenggaranya pengelolaan dan penatausahaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan, dan kerumahtanggan di lingkungan PPKGBK	Persentase terselenggaranya pengelolaan dan penatausahaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan, dan kerumahtanggan di lingkungan PPKGBK		100%	100%	48.956	51.000	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2015	2016	
SATUAN KERJA BLU KEMAYORAN						**155.575,32**	**232.183,10**	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA								
PPK Kemayoran								
1132 Dukungan Manajemen Kawasan Kemayoran	Dokumen administrasi umum, keuangan dan pengelolaan aset	Persentase dokumen administrasi umum, laporan keuangan dan pengelolaan aset yang disusun.		100%	100%	106.011	130.831	
1134 Pengusahaan Kawasan Kemayoran	Layanan usaha, penanganan legalitas hukum, pengamanan wilayah dan bina lingkungan di Kawasan Kemayoran	Persentase layanan usaha, penanganan legalitas hukum dan kehumasan serta pembinaan masyarakat di Kawasan Kemayoran sesuai dengan standar pelayanan minimal		100%	100%	19.788	38.054	
4023 Pengembangan Kawasan Kemayoran	Dokumen perencanaan dan evaluasi, pembangunan dan pengawasan, penataan dan pemeliharaan kawasan Kemayoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, pembangunan dan pengawasan sesuai UDGL serta pemeliharaan sarana dan prasarana di Kawasan Kemayoran		100%	100%	29.776	63.299	

B. TAHUN . . .

B. TAHUN 2017

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
				2017	2017	
SATUAN KERJA SEKRETARIAT NEGARA					822.451,300	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA					801.439,136	
	1 Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada Mensesneg di bidang perencanaan, keuangan, ketatausahaan, teknologi informasi dan komunikasi, dan penyediaan sarana dan prasarana	1 Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disampaikan kepada instansi terkait dengan tepat waktu		100%		
		2 Indeks kepuasan pengguna layanan administrasi keuangan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		2.75		
		3 Kualitas opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara		WTP		
		4 Indeks kepuasan pengguna layanan penatausahaan dan pengamanan naskah dinas, dokumen/arsip di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		2.75		
		5 Indeks kepuasan layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		2.75		
		6 Indeks Kepuasan layanan penyediaan sarana dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar		2.75		
		7 Indeks Kepuasan layanan penyediaan sarana dan prasarana Pejabat Negara tertentu		2.75		

2. Meningkatnya . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
				2017	2017	
	2 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia	1. Persentase Rancangan Keputusan Menteri Sekretaris Negara tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara		100%		
		2. Indeks kepuasan layanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		3.3		
		3 Indeks kepuasan peserta pendidikan dan pelatihan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan		4.1		
		4 Indeks peningkatan kompetensi peserta pasca pendidikan dan pelatihan		3.6		
	3 Meningkatnya efektivitas organisasi, tata laksana dan akuntabilitas kinerja	1 Persentase Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara di bidang organisasi yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara		100%		
		2 Persentase hasil analisis jabatan dan evaluasi jabatan yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara		100%		
		3 Persentase Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara di bidang tata laksana yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara		100%		
		4 Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada seluruh satuan organisasi/satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan kategori AA (Sangat Memuaskan)		100%		
	4 Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai standar		100%		

Sekretariat . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
				2017	2017	
Sekretariat Kementerian					**784.972,37**	
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaporan dan evaluasi kegiatan serta dokumen lainnya terkait perencanaan dan penganggaran Kementerian Sekretariat Negara yang berkualitas	1 Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disampaikan kepada instansi terkait dengan tepat waktu	Jakarta	100%	10.372,597	Biro Perencanaan
		2 Persentase dokumen pelaporan dan evaluasi kegiatan yang disusun sesuai dengan standar		100%		
		3 Persentase dokumen lainnya terkait perencanaan dan penganggaran yang disusun sesuai dengan standar		100%		
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang berkualitas dan akuntabel	1 Persentase pelayanan pelaksanaan anggaran sesuai dengan standar	Jakarta	100%	283.746,244	Biro Keuangan
		2 Persentase tingkat keandalan laporan keuangan sesuai dengan peraturan		100%		
Penyelenggaraan Acara/Keprotokolan, Ketatausahaan, dan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Terselenggaranya acara/keprotokolan, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang berkualitas	1 Indeks kepuasan pengguna layanan penatausahaan dan pengamanan naskah dinas, dokumen/arsip di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Jakarta	100%	3.733,798	Biro Tata Usaha
Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Terselenggaranya layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi secara andal dan aman	1 Indeks kepuasan pengunjung website Kementerian Sekretariat Negara	Jakarta	2.75	10.365,62	Biro Informasi dan Teknologi
		2 Indeks kepuasan layanan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi sistem informasi		2.75		
		3 Indeks ketersediaan layanan infrastruktur komunikasi data dan informatika		2.75		
Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	Tersedianya sarana dan prasarana kantor, rumah jabatan Pejabat Negara, wisma serta pelayanan umum lainnya yang berkualitas	1 Indeks Kepuasan layanan penyediaan sarana dan prasarana Indeks Kepuasan layanan penyediaan sarana dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara	Jakarta	2.75	476.754,105	Biro Umum
		2 Indeks Kepuasan layanan penyediaan sarana dan prasarana Pejabat Negara tertentu		2.75		
		3 Persentase Laporan pengelolaan BMN milik Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan ketentuan		100%		

Deputi . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
				2017	2017	
Deputi Bidang Administrasi Aparatur					**15.405,35**	
Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1 Persentase Pelaksanaan e-Formasi ASN dan pengadaan calon ASN Kementerian Sekretariat Negara yang dilaksanakan sesuai standar	Jakarta	100%	3.384,90	Biro Sumber Daya Manusia
		2 Persentase rancangan Kepmensesneg tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan yang disetujui oleh Mensesneg		100%		
		3 Tingkat kepuasan layanan admnistrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		3.4		
		4 Rasio tingkat pelanggaran disiplin ASN		5		
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kementerian Sekretariat Negara	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang profesional	1 Persentase penyelenggaraan diklat sesuai standar	Jakarta	100%	11.131,92	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
		2 Persentase peserta diklat yang memperoleh sertifikat		91%		
		3 Jumlah penerima beasiswa rintisan gelar		15 Orang		
		4 Jumlah kurikulum dan modul diklat		1 Buku		
		5 Jumlah laporan dukungan kegiatan penyelenggaraan diklat		1 Laporan		
Penataan Organisasi, Ketatalaksanaan serta Pengembangan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sekretariat Negara	Meningkatnya efektivitas organisasi, tata laksana dan akuntabilitas kinerja	1 Persentase Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara di bidang organisasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur	Jakarta	100%	888,532	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja
		2 Persentase hasil analisis jabatan dan evaluasi jabatan yang disetujui oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur		100%		
		3 Persentase Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara di bidang tata laksana yang disetujui oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur		100%		

4. Persentase . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
				2017	2017	
		4 Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada seluruh satuan organisasi/satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan kategori AA (Sangat Memuaskan)		100%		
Inspektorat					**1.061,42**	
Penyelenggaraan Pengawasan Kementerian Sekretariat Negara	Terselenggaranya pengawasan sesuai ketentuan	1 Persentase satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan	Jakarta	100%	1.061,424	Inspektorat
		2 Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti		100%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN					**21.012,164**	
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan					**2.436,42**	
	1 Meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, serta penyiapan pendapat hukum	**1 Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara**		**100%**		
		2 Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara		**100%**		
		3 Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan		**100%**		

2. Terselenggaranya . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
				2017	2017	
	2 Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden dan /atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik	Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti presiden, wakil presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik		100%		
	3 Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti		100%		
	4 Terselenggaranya hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Persentase pelayanan hubungan masyarakat terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar		100%		
	5 Meningkatnya kualitas dukungan teknis dan administrasi penanganan administrasi pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan pejabat lainnya	1 Persentase penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang diajukan kepada Presiden		100%		
		2 Persentase Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara		100%		
		3 Persentase RKeppres tentang kenaikan pangkat,pemberhentian,dan pensiun ASN yang menduduki JPT Utama, JPT Madya, dan Jabatan Fungsional Jenjang Utama, serta alih status perwira tinggi TNI/Polri sebagai ASN yang disetujui oleh Mensesneg		100%		

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
				2017	2017	
	6 Meningkatnya efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kualitas pelayanan administrasi perjalanan luar negeri	Persentase efektivitas koordinasi kerjasama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang di administrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara		100%		
Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian	Tersedianya izin prakarsa, analisis dan penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, RInpres, dan otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres di bidang perekonomian	1 Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan	Jakarta	100%	319,960	Asisten Deputi Bidang Perekonomian
		2 Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan		100%		
Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Tersedianya izin prakarsa, analisis dan penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, RInpres, dan otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres di bidang politik, hukum, dan keamanan	1 Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan	Jakarta	100%	317,51	Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
		2 Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan		100%		
Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah	Tersedianya izin prakarsa, analisis dan penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, RInpres, dan otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah	1 Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pemerintahan Dalam negeri dan Otonomi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan	Jakarta	100%	303,61	Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
		2 Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan		100%		

Pelaksanaan . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
				2017	2017	
Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Tersedianya izin prakarsa, analisis dan penyelesaian RUU, RPerpu, RPP, RPerpres, RKeppres, RInpres, dan otentifikasi UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	1 Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan	Jakarta	100%	443,52	Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		2 Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan		100%		
Pelaksanaan Analisis dan Administrasi di Bidang Litigasi dan Bantuan Hukum, Ekstradisi, Prerogatif dan Naturalisasi, serta Pengadministrasian Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya analisis izin prakarsa RUU dan RPerpres mengenai pengesahan perjanjian internasional dan penyelesaian pendapat hukum di bidang litigasi dan bantuan hukum, ekstradisi, prerogatif dan naturalisasi, serta pengadministrasian Peraturan Perundang-undangan	1 Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang perjanjian internasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan	Jakarta	100%	1.051,82	Asisten Deputi Bidang Hukum
		2 Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan		100%		
		3 Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan		100%		

Deputi . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
				2017	2017	
Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan					**3.817,26**	
Pelaksanaan Hubungan Dengan Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural dan Lembaga Daerah	Terlaksananya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, dan lembaga daerah	Persentase dukungan hubungan kelembagaan antara Presiden/Wakil Presiden dengan lembaga negara, lembaga non struktural, dan lembaga daerah yang dilaksanakan sesuai dengan standar	Jakarta	100%	621,599	Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah
Pelaksanaan Hubungan Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik	Terlaksananya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik	Persentase dukungan hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang dilaksanakan sesuai dengan standar	Jakarta	100%	863,341	Asisten Deputi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik
Penanganan Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti	Jakarta	100%	1.233,181	Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat
Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Tersedianya layanan kehumasan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Persentase pelayanan hubungan masyarakat terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar	Jakarta	100%	1.099,139	Asisten Deputi Hubungan Masyarakat
Deputi Bidang Administrasi Aparatur					**1.044,22**	
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pejabat Negara serta Administrasi Lainnya yang berkaitan Dengan Pejabat Negara	Meningkatnya kecepatan, ketepatan, dan keakuratan penanganan administrasi pejabat negara dan pejabat lainnya	1 Persentase penyelesaian rancangan dan otentifikasi Keputusan Presiden tentang pengangkatan pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya sesuai standar	Jakarta	100%	604,589	Biro Administrasi Pejabat Negara
		2 Persentase pelayanan administrasi dan informasi pejabat negara dan pejabat lainnya		100%		

Penyelenggaraan . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
				2017	2017	
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pejabat Pemerintahan serta Administrasi Lainnya yang berkaitan dengan Pejabat Pemerintahan	Meningkatnya kecepatan, ketepatan, dan keakuratan penanganan administrasi pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya	1 Persentase rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian, dan kenaikan pangkat pejabat pemerintahan serta rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat lainnya yang diselesaikan sesuai dengan standar	Jakarta	100%	439,627	Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan
Sekretariat Kementerian					**13.714,27**	
Penyelenggaraan Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri	Terselenggaranya Kerja Sama Teknik Luar Negeri dan program Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan dan Triangular yang cepat, tepat, dan aman	1 Persentase dokumen kerja sama teknik meliputi proyek, tenaga ahli, dan beasiswa yang diselesaikan sesuai standar	Jakarta	100%	13.714,27	Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri
		2 Persentase pelaksanaan sosialisasi kerja sama teknik luar negeri		100%		
		3 Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan monitoring evaluasi kerja sama teknik luar negeri		100%		
		4 Persentase pelaksanaan Program Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan (KTSS) Indonesia		100%		

Unit . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
				2017	2017	
UNIT ORGANISASI SEKRETARIAT PRESIDEN					**429.048,24**	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA					**429.048,24**	
	1 Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden	**Persentase kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden**		**100%**		
	2 Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	**Persentase kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden**		**100%**		
Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana					**297.067,80**	
Pelaksanaan Tugas Administrasi Kesekretariatan	Terselenggaranya dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai standar	Persentase dukungan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan ketatausahaan yang sesuai standar	Jakarta	100%	76.246,153	Biro Administrasi
Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Jakarta	Terselenggaranya dukungan jamuan, pengelolaan seni budaya dan tata graha, peralatan dan penataan lingkungan, serta kerumahtanggaan lainnya yang sesuai standar	Persentase dukungan pelaksanaan jamuan, seni budaya dan tata graha, peralatan dan penataan lingkungan, serta kerumahtanggaan lainnya yang sesuai standar	Jakarta	100%	67.618,884	Biro Pengelolaan Istana
Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Bogor	Terselenggaranya dukungan administrasi dan kerumahtanggaan Istana Kepresidenan Bogor yang sesuai standar	Persentase dukungan administrasi dan kerumahtanggaan Istana Kepresidenan Bogor yang sesuai standar	Jawa Barat	100%	28.084,00	Istana Kepresidenan Bogor

Penyelenggaraan . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
				2017	2017	
Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Cipanas	Terselenggaranya dukungan administrasi dan kerumahtanggaan Istana Kepresidenan Cipanas yang sesuai standar	Persentase dukungan administrasi dan kerumahtanggaan Istana Kepresidenan Cipanas yang sesuai standar	Jawa Barat	100%	19.949,698	Istana Kepresidenan Cipanas
Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Yogyakarta	Terselenggaranya dukungan administrasi dan kerumahtanggaan Istana Kepresidenan Yogyakarta yang sesuai standar	Persentase dukungan administrasi dan kerumahtanggaan Istana Kepresidenan Yogyakarta yang sesuai standar	DIY	100%	27.906,820	Istana Kepresidenan Yogyakarta
Penyelenggaraan Pengelolaan Istana Kepresidenan Tampaksiring	Terselenggaranya dukungan administrasi dan kerumahtanggaan Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali yang sesuai standar	Persentase dukungan administrasi dan kerumahtanggaan Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali yang sesuai standar	Bali	100%	21.074,995	Istana Kepresidenan Tampaksiring
Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Istana Kepresidenan	Terselenggaranya dukungan pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana serta dukungan umum lainnya yang berkualitas	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan umum lainnya yang sesuai standar	Jakarta	100%	56.187,247	Biro Umum
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media					**131.980,44**	
Penyelenggaraan Dukungan Pers Media dan Informasi	Terselenggaranya dukungan pers, media, dan informasi yang berkualitas	Persentase dukungan pers, media, dan informasi yang sesuai standar	Jakarta	100%	3.384,758	Biro Pers, Media dan Informasi
Penyelenggaraan Keprotokolan	Terselenggaranya dukungan keprotokolan yang sesuai standar	Persentase dukungan keprotokolan untuk kegiatan kenegaraan/resmi, Tamu Negara, dan kegiatan penting lainnya yang sesuai standar	Jakarta	100%	128.595,682	Biro Protokol

SATUAN . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
				2017	2017	
SATUAN KERJA SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN					**188.955,331**	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA					**185.749,050**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan dan dukungan keprotokolan dan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	**1 Persentase kelancaran dukungan pemberian pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden**		**100%**		
		2 Persentase kelancaran dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden		**100%**		
Deputi Bidang Administrasi					**185.749,05**	
Pelaksanaan Dukungan Perencanaan Anggaran, Keuangan dan Manajemen Kinerja	Terlaksananya perencanaan dan evalusi penganggaran, pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan dan akuntansi Barang Milik negara serta manajemen kinerja Sekretariat Wakil Presiden yang berkualitas	1 Persentase perencanaan dan evaluasi anggaran sesuai standar	Jakarta	100%	26.763,053	Biro Perencanaan dan Keuangan
		2 Persentase pengelolaan keuangan sesuai standar		100%		
		3 Persentase pelaporan akuntansi dan BMN sesuai standar		100%		
		4 Persentase pelaksanaan manajemen kinerja sesuai standar		100%		
Pelaksanaan Dukungan Tata Usaha, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Kepegawaian	Terlaksananya urusan ketatausahaan, pengelolaan teknologi informasi, dan kepegawaian, pengoordinasian evaluasi organisasi dan tatalaksana serta pelayanan kesehatan pejabat dan pegawai Sekretariat Wakil Presiden yang berkualitas	1 Persentase urusan ketatausahaan sesuai standar	Jakarta	100%	6.265,601	Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi dan Kepegawaian
		2 Persentase pengelolaan teknologi informasi sesuai standar		100%		
		3 Persentase pengelolaan kepegawaian dan tatalaksana sesuai standar		100%		
		4 Persentase layanan kesehatan sesuai standar		100%		

Pelaksanaan . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
				2017	2017	
Pelaksanaan Dukungan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya dukungan kesekretariatan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang berkualitas	Persentase dukungan kesekretariatan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sesuai dengan standar		-	2.576,789	Sekretariat TNP2K
Pelaksanaan Dukungan Sarana dan Prasarana Sekretariat Wakil Presiden	Tersedianya sarana dan prasarana Sekretariat Wakil Presiden yang berkualitas	1 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana gedung dan bangunan sesuai standar	Jakarta	100%	41.661,693	Biro Umum
		2 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perlengkapan sesuai standar		100%		
		3 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kendaraan dan penyelenggaraan ketertiban dan keamanana dalam sesuai standar		100%		
		4 Persentase pengelolaan perpustakaan sesuai standar		100%		
Pelaksanaan Dukungan Sarana dan Prasarana Sekretariat Wakil Presiden	Tersedianya sarana dan prasarana Sekretariat Wakil Presiden yang berkualitas	1 Persentase dukungan keprotokolan kepada Wakil Presiden sesuai standar	Jakarta	100%	108.481,914	Biro Protokol
		2 Persentase dukungan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden sesuai standar		100%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN					**3.206,281**	
	Meningkatnya kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden	**Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden**		**100%**		
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan					**977,31**	
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Peningkatan dan Pengembangan Kesejahteraan	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang peningkatan dan pengembangan kesejahteraan	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang peningkatan dan pengembangan kesejahteraan sesuai standar	Jakarta	100%	251,401	Asisten Deputi Peningkatan dan Pengembangan Kesejahteraan

Pelaksanaan . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
				2017	2017	
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang perlindungan sosial dan penanggulangan bencana	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang perlindungan sosial dan penanggulangan bencana sesuai standar	Jakarta	100%	262,538	Asisten Deputi Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang pembangunan sumber daya manusia	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang pembangunan sumber daya manusia sesuai standar	Jakarta	100%	463,374	Asisten Deputi Pembangunan Sumber Daya Manusia
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan					**1.136,28**	
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sesuai standar	Jakarta	100%	222,803	Asisten Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik sesuai standar	Jakarta	100%	250,264	Asisten Deputi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang hubungan luar negeri	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang hubungan luar negeri sesuai standar	Jakarta	100%	176,861	Asisten Deputi Hubungan Luar Negeri
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan sesuai standar	Jakarta	100%	210,273	Asisten Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang komunikasi dan informasi publik	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang komunikasi dan informasi publik sesuai standar	Jakarta	100%	276,082	Asisten Deputi Komunikasi dan Informasi Publik

Deputi . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
				2017	2017	
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman					**1.092,69**	
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang keuangan, investasi, dan badan usaha	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang keuangan, investasi, dan badan usaha sesuai standar	Jakarta	100%	265,958	Asisten Deputi Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha
Asisten Deputi Bidang Industri, Perdagangan, Pariwisata dan, Ekonomi Kreatif	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang Industri, Perdagangan, Pariwisata dan, Ekonomi Kreatif	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang industri, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif sesuai standar	Jakarta	100%	279,119	Asisten Deputi Bidang Industri, Perdagangan, Pariwisata dan, Ekonomi Kreatif
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Hayati	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang ketahanan pangan dan sumber daya hayati	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang ketahanan pangan dan sumber daya hayati sesuai standar	Jakarta	100%	245,203	Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Hayati
Asisten Deputi Bidang Infrastruktur, Energi, dan Tata Ruang	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang infrastruktur, energi, dan tata ruang	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang infrastruktur, energi, dan tata ruang sesuai standar	Jakarta	100%	302,405	Asisten Deputi Bidang Infrastruktur, Energi, dan Tata Ruang

SATUAN . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
				2017	2017	
SATUAN KERJA SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN					**29.250,00**	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA					**6.789,683**	
	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Militer Presiden	**Indeks kepuasan pengguna layanan di lingkungan Sekretariat Militer Presiden**		**3.83 (skala 5)**		
Sekretaris Militer Presiden					**6.789,68**	
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Militer Presiden	1 Dokumen Administrasi Umum	1 Persentase dokumen bidang administrasi umum yang diselesaikan sesuai standar	Jakarta	100%	6.789,683	Biro Umum
	2 Layanan Perkantoran	2 Persentase layanan pimpinan, kepegawaian dan perkantoran yang dilaksanakan sesuai rencana		100%		
	3 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	3 Persentase fasilitas kerja yang dapat disediakan sesuai rencana		100%		
	4 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			100%		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN					**22.460,32**	
	Terselenggaranya kegiatan VVIP, dukungan administrasi personel TNI dan POLRI, dan penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan yang berkualitas	**1 Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman**		**100%**		
		2 Persentase pelayanan administrasi personel TNI dan POLRI yang disetujui oleh Presiden		**100%**		
		3 Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden		**100%**		

Sekretaris . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
				2017	2017	
Sekretaris Militer Presiden					**22.460,317**	
Pengkoordinasian Pengamanan Fisik dan Non Fisik bagi VVIP	1 Layanan Pengamanan VVIP yang terselenggara dengan tertib, aman, dan lancar	1 Persentase layanan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan negara asing (VVIP) sesuai standar pelayanan	Jakarta	100%	3.039,500	Biro Pengamanan
	2 Kegiatan VVIP terselenggara dengan tertib, aman, dan lancar dalam Rangkaian Acara HUT RI	2 Persentase kegiatan pengamanan dalam rangkaian acara HUT RI yang terlaksana sesuai Rencana Garis Besar Kegiatan HUT RI		100%		
Penyelenggaraan Dukungan Teknis dan Administrasi Personel TNI dan Polri	1 Rancangan Naskah Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengangkatan, Kenaikan Pangkat, dan Pemberhentian Personel TNI dan Polri	1 Persentase penyelesaian Rancangan Naskah Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang wewenang penetapannya berada Presiden sesuai standar pelayanan	Jakarta	100%	1.909,000	Biro Personil TNI dan Polri
	2 Kegiatan Upacara Kenegaraan dan Pelantikan TNI/Polri yang kewenangannya berada pada Presiden	2 Persentase upacara kenegaraan dan pelantikan TNI/polri yang kewenangannya berada pada Presiden yang dilaksanakan sesuai rencana		100%		
	3 Personel TNI dan Polri di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan serta pembinaannya	3 Persentase personel TNI dan Polri di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan serta pembinaannya sesuai standar		100%		

Penyelenggaraan . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
				2017	2017	
Penyelenggaraan Administrasi Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	1 Rancangan Naskah Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	1 Persentase penyelesaian Rancangan Keppres tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sesuai standar pelayanan	Jakarta	100%	17.511,82	Biro Gelar, Tanda Jasa dan Kehormatan
	2 Benda Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	2 Persentase ketersediaan benda gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan sesuai rencana		100%		
	3 Rekomendasi pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	3 Persentase usulan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang mendapatkan rekomendasi		100%		
	4 Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan di daerah	4 Persentase pelaksanaan penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang dilaksanakan sesuai usulan		100%		

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
				2017	2017		
SATUAN KERJA PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN					**47.117,96**		
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA					**47.117,96**		
Pasukan Pengamanan Presiden					**47.117,96**		
	Peningkatan kualitas bidang inspektorat, perencanaan, intelijen, operasi, personel, dan dukungan umum logistik	**Persentase kegiatan dan kekuatan personel, jumlah kegiatan dan dukungan dalam pelaksanaan advance tim dan main grup**		**100%**			
Perencanaan dan Penganggaran Paspampres		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran serta laporan evaluasi	Jakarta	100%	601,28	Asisten Perencanaan	
Pengawasan Internal Paspampres		Persentase temuan yang di tindaklanjuti dan laporan audit serta kegiatan reviu	Jakarta	100%	281,47	Ir. Paspampres	
Intelijen Paspampres		Persentase kegiatan operasi intelijen, dan produk data intelijen	Jakarta	100%	795,23	Asisten Intelijen	
Operasi dan Latihan Paspampres		Persentase volume kegiatan pengamanan VVIP yang terlaksana	Jakarta	100%	1.295,43	Asisten Operasi	
Personil dan Pengamanan Paspampres		Presentase kekuatan personel, kegiatan, dan dukungan dalam pelaksanaan advance tim dan main grup	Jakarta	100%	26.127,15	Asisten Personel	
Dukungan Umum Logistik Paspampres		Persentase Dukungan Perbekalan, Materiil, Fasilitas da Jasa serta Dukunga Anggaran yang Memadai	Jakarta	100%	18.017,41	Asisten Logistik	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
				2017	2017		
SATUAN KERJA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN					**34.800,00**		
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA					**34.800,00**		
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden					**34.800,00**		
	Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	**1 Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden**		**91%**			
Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi		1 Persentase ketersediaan data dan informasi sesuai kebutuhan Dewan Pertimbangan Presiden secara tepat waktu	Jakarta	100%	825,80	Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	
		2 Jumlah rancangan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu		2 Dokumen			
Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden	Terwujudnya dukungan pelayanan keprotokolan dan persidangan serta pelayanan administrasi umum di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden	1 Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan	Jakarta	2 Dokumen	33.974,20	Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden	
		2 Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan		1 Dokumen			

3. Jumlah . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
				2017	2017		
		3 Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan		10 Dokumen			
		4 Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan		9 Dokumen			
		5 Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan		100%			
		6 Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan Persidangan		100%			
		7 Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan		100%			
		8 Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa		100%			

SATUAN . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
				2017	2017		
SATUAN KERJA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN					**74.589,00**		
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA					**74.589,00**		
Sekretariat LPSK					**74.589,00**		
	Terciptanya layanan masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana	**Persentase pelaksanaan layanan masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban dan kegiatan pendukungnya yang sesuai ketentuan**		**100%**			
Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban dan Dukungan Lainnya di Lingkungan LPSK		1 Persentase dukungan kelembagaan terhadap pemberian perlindungan saksi dan atau korban dalam peradilan pidana	Jakarta	100%	74.589,00	Sekretariat LPSK	
		2 Persentase pemberian perlindungan saksi dan atau korban yang sesuai ketentuan		100%			
		3 Persentase sarana dan prasarana yang mencukupi dalam mendukung kegiatan perlindungan saksi dan atau korban sesuai target yang ditetapkan		100%			
		4 Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui rehabilitasi dan upaya lainnya		120 orang			

SATUAN . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
				2017	2017		
SATUAN KERJA KANTOR STAF PRESIDEN					**120.848,00**		
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA					**120.848,00**		
Sekretariat KSP					**120.848,00**		
	Terselenggaranya pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis	**Persentase terselenggaranya pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis sesuai rencana**		**100%**			
Pemberian Dukungan Kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Melaksanakan Pengendalian Program-Program Prioritas Nasional, Komunikasi Politik, dan Pengelolaan Isu Strategis		Persentase rekomendasi kebijakan yang diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis	Jakarta	100%	120.848,00	Sekretariat KSP	
		Persentase pemberian layanan operasional situation room dalam mendukung tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden sesuai standar		100%			
		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran oleh Sekretariat Kantor Staf Presiden secara tepat waktu					
		Persentase pemberian layanan serta dukungan operasional perkantoran kepada Kantor Staf Presiden sesuai standar					
		Persentase penyelesaian laporan pelaksanaan kegiatan oleh Sekretariat Kantor Staf Presiden secara tepat waktu					
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran bagi Kantor Staf Presiden sesuai standar		100%			

SATUAN . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
				2017	2017	
SATUAN KERJA BLU GELORA BUNG KARNO					**153.290**	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA						
BLU Gelora Bung Karno						
Pengelolaan dan penatausahaan keuangan di lingkungan PPKGBK	Terselenggaranya pengelolan, penatausahaan keuangan dan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta pengelolaan dan	Persentase dokumen perencanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai standar		100%	4.626	
Peningkatan pembangunan dan pengembangan usaha di lingkungan PPKGBK	Terselenggaranya pembangunan dan pengembangan usaha di lingkungan PPKGBK sesuai standar	Persentase penyelenggaraan perencanaan, pembangunan dan pengembangan usaha di lingkungan PPKGBK Sesuai standar		100%	46.290	
Pengelolaan dan penatausahaan kepegawaian, hukum, humas, dan kerumahtanggaan di lingkungan PPKGBK	Terselenggaranya pengelolaan dan penatausahaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan, dan kerumahtanggan di lingkungan PPKGBK	Persentase terselenggaranya pengelolaan dan penatausahaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan, dan kerumahtanggan di lingkungan PPKGBK		100%	102.374	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
				2017	2017	
SATUAN KERJA BLU KEMAYORAN					**188.096,05**	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA						
PPK Kemayoran						
1132 Dukungan Manajemen Kawasan Kemayoran	Dokumen administrasi umum, keuangan dan pengelolaan aset	Persentase dokumen administrasi umum, laporan keuangan dan pengelolaan aset yang disusun.		100%	111.533	
1134 Pengusahaan Kawasan Kemayoran	Layanan usaha, penanganan legalitas hukum, pengamanan wilayah dan bina lingkungan di Kawasan Kemayoran	Persentase layanan usaha, penanganan legalitas hukum dan kehumasan serta pembinaan masyarakat di Kawasan Kemayoran sesuai dengan standar pelayanan minimal		100%	30.432	
4023 Pengembangan Kawasan Kemayoran	Dokumen perencanaan dan evaluasi, pembangunan dan pengawasan, penataan dan pemeliharaan kawasan Kemayoran	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, pembangunan dan pengawasan sesuai UDGL serta pemeliharaan sarana dan prasarana di Kawasan Kemayoran		100%	46.131	

C. TAHUN . . .

C. TAHUN 2018-2019

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
SATUAN KERJA SEKRETARIAT NEGARA						709.350,89	733.089,40	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA						692.580,80	715.732,36	
Sekretariat Kementerian						675.421,82	698.025,39	
	1 Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada Menteri Sekretaris Negara di bidang perencanaan, keuangan, dan ketatausahaan	1 Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disampaikan kepada instansi terkait		100%	100%			
		2 Rata-rata indeks kepuasan pengguna layanan administrasi keuangan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		3.0	3.0			
		3 Kualitas opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara		WTP	WTP			
		4 Rata-rata indeks kepuasan pengguna layanan penatausahaan naskah dinas, dokumen/arsip di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		3.0	3.0			
	2 Tersedianya layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang berkualitas	Indeks kepuasan layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan kementerian Sekretariat Negara		3.0	3.0			
	3 Tersedianya layanan penyediaan sarana dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara dan pejabat negara yang berkualitas	1 Indeks kepuasan layanan penyediaan sarana dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara		3.0	3.0			
		2 Indeks kepuasan layanan penyediaan sarana dan prasarana Pejabat Negara tertentu		3.0	3.0			

Pelaksanaan . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaporan dan evaluasi kegiatan serta dokumen lainnya terkait perencanaan dan penganggaran Kementerian Sekretariat Negara yang berkualitas	1 Persentase dokumen perencanaan yang disusun dengan kategori "baik"	Jakarta	100%	100%	4.954,81	5.128,23	Biro Perencanaan
		2 Persentase satuan kerja yang menerapkan penganggaran berbasis kinerja	Jakarta	100%	100%			
		3 Persentase dokumen pelaporan dan evaluasi kegiatan yang disusun sesuai dengan standar	Jakarta	100%	100%			
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang berkualitas dan akuntabel	1 Persentase pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan sesuai standar	Jakarta	100%	100%	275.289,21	283.888,15	Biro Keuangan
		2 Persentase tingkat keandalan laporan keuangan sesuai dengan peraturan		100%	100%			
Penyelenggaraan Acara/Keprotokolan, Ketatausahaan, dan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Terselenggaranya urusan ketatausahaan, pengelolaan bahan kebijakan, kepustakaan, arsip dan dokumentasi dan keprotokolan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	1 Indeks kepuasan pengguna layanan penatausahaan dan pengamanan naskah dinas, dan dokumen kenegaraan di lingkungan Kemensetneg	Jakarta	3.0	3.0	3.333,25	3.449,91	Biro Tata Usaha
		2 Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan dan pengamanan arsip di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		3.0	3.0			
		3 Indeks kepuasan pengguna layanan perpustakaan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		3.0	3.0			
		4 Persentase pelayanan acara dan keprotokolan kepada Mensesneg sesuai dengan jadwal		100%	100%			
		5 Persenatse hasil analisis kepada Menteri Sekretaris Negara yang diselesaikan tepat waktu		100%	100%			
Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Terselenggaranya layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi secara andal dan aman	1 Indeks kepuasan pengunjung website Kementerian Sekretariat Negara	Jakarta	2,75	2,75	10.624,86	10.996,73	Biro Informasi dan Teknologi
		2 Indeks pembuatan/pengembangan aplikasi sistem informasi		2,75	2,75			

3. Indeks . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
		3 Indeks kepuasan layanan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi sistem informasi		2,75	2,75			
		4 Indeks ketersediaan layanan infrastruktur komunikasi data dan informasi		2,75	2,75			
Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum Lainnya Kemenetrian Sekretariat Negara	Tersediannya sarana dan prasarana kantor, rumah jabatan Pejabat Negara, wisma serta pelayanan umum lainnya yang berkualitas	1 Indeks kepuasan layanan penyediaan sarana dan prasarana Pejabat Negara tertentu	Jakarta	3.0	3.0	381.219,69	394.562,38	Biro Umum
		2 Indeks kepuasan penyediaan sarana dan prasarana Kemensetneg		3.0	3.0			
		3 Persentase laporan pengelolaan BMN milik Kemensetneg sesuai dengan ketentuan		100%	100%			
		4 Indeks kepuasan layanan kesehatan		100%	100%			
Deputi Bidang Administrasi Aparatur						**15.982,46**	**16.489,27**	
	1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia	**1 Persentase pengisian jabatan pimpinan tinggi,jabatan administrator, dan jabatan pengawas di lingkungan Kementerian Sekretariat yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan**		**92**	**92**			
		2 Indeks kepuasan layanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kemenetrian Sekretariat Negara		**3,4**	**3,4**			
		3 Indeks kepuasan peserta pendidikan dan pelatihan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan		**4,1**	**4,1**			
		4 Indeks peningkatan kompetensi peserta pasca pendidikan dan pelatihan		**3,6**	**3,6**			
	2 Meningkatnya efektivitas organisasi, tata laksana dan akuntabilitas kinerja	**1 Hasil evaluasi kelembagaan di lingkungan Kemensetneg**		**100%**	**100%**			
		2 Persentase hasil evaluasi pelaksanaan proses bisnis di lingkungan Kemensetneg dengan kategori baik		**100%**	**100%**			

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
		3 Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada seluruh satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Kemensetneg dengan kategori AA (sangat memuaskan)		**100%**	**100%**			
Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia	1 Persentase penyusunan s-formasi ASN yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Jakarta	100%	100%	3.315,11	3.431,14	Biro Sumber Daya Manusia
		2 Persentase pengadaan calon ASN Kementerian Sekretariat Negara yang dilaksanakan sesuai ketentuan		100%	100%			
		3 Persentase pengisian jabatan pimpinan tinggi,jabatan administrator, dan jabatan pengawas di lingkungan Kementerian Sekretariat yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		92%	92%			
		4 Persentase SK kenaikan pangkat PNS yang diselesaikan tepat waktu		100%	100%			
		5 Persentase SK pensiun PNS yang diselesaikan tepat waktu		100%	100%			
		6 Persentase pejabat/pegawai yang melaporkan LHKPN dan LHKASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan		100%	100%			
		7 Persenatse pejabat/pegawai yang telah memiliki profil kompetensi		95%	95%			
		8 Indeks kepuasan layanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kemensetneg		3,4	3,4			
		9 Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai di lingkungan Kemensetneg		100%	100%			

Penyelenggaraan . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kementerian Sekretariat Negara	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan SDM yang profesional	1 Indeks kepuasan peserta pendidikan dan pelatihan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Jakarta	4,1	4,1	11.680,34	12.036,57	Pusat Pendidikan dan Pelatihan
		2 Indeks peningkatan kompetensi peserta pasca pendidikan dan pelatihan		3,7	3,7			
		3 Persentase peserta diklat yang memperoleh sertifikat		91%	91%			
		4 Jumlah penerima beasiswa rintisan gelar		15	15			
		5 Jumlah pengembangan kurikulum dan media pembelajaran		1	1			
		6 Jumlah laporan dukungan kegiatan penyelenggaraan diklat		1	1			
Penataan organisasi, ketatalaksanaan, serta pengembangan akuntabilitas kinerja Kemensetneg	Meningkatnya efektivitas organisasi, tata laksana dan akuntabilitas kinerja	1 Hasil evaluasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Jakarta	Kategori II (50-74,99)	Kategori II (50-74,99)	987,01	1.021,56	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja
		2 Jumlah rancangan Peraturan/Keputusan Menteri Sekretaris Negara/telaahan staf di bidang organisasi yang disetujui Deputi Bidang Administrasi Aparatur		2	2			
		3 Jumlah dokumen analisis jabatan/analisis beban kerja/evaluasi jabatan/standar kompetensi jabatan yang disetujui Deputi Bidang Administrasi Aparatur		1	1			
		4 Jumlah rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara/dokumen di bidang tata laksana yang disetujui Deputi Bidang Administrasi Aparatur		4	4			
		5 Jumlah laporan sosialisasi kebijakan di bidang tata laksana di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara		6	6			

6. Persentase . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
		6 Persentase hasil evaluasi pelaksanaan proses bisnis di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan kategori Baik		72	72			
		7 Jumlah laporan pengembangan SAKIP di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat Kantor Staf Presiden yang disusun		6	6			
		8 Jumlah dokumen RKT dan PK Kemensetneg serta satuan organisasi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat Kantor Staf Presiden yang disusun		5	5			
		9 Jumlah dokumen LKj Kemensetneg serta laporan hasil koordinasi penyusunan LKj satuan organisasi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden,dan Sekretariat Kantor Staf Presiden yang disusun		4	4			
		10 Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada seluruh satuan organisasi/ unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan kategori AA (Sangat Memuaskan)		60	60			
		11 Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan biro		100	100			
Inspektorat						**1.176,52**	**1.217,70**	
	Meningkatnya kualitas pengawasan	**1 Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti**		**100%**	**100%**			
		2 Persentase satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku		**100%**	**100%**			

Penyelenggaraan . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
Penyelenggaraan Pengawasan Kementerian Sekretariat Negara	Meningkatnya kualitas pengawasan	1 Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti	Jakarta	100%	100%	1.176,52	1.217,70	Inspektorat
		2 Persentase satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku		100%	100%			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN						**16.770,09**	**17.357,04**	
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan						**2.674,50**	**2.768,11**	
	Meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi	**1 Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara**		**100%**	**100%**			
		2 Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara		**100%**	**100%**			
		3 Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan		**100%**	**100%**			
Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian	Tersedianya hasil analisis dan penyelesaian izin prakarsa, Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang perekonomian yang berkualitas	1 Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang perekonomian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan	Jakarta	100%	100%	367,95	380,83	Asisten Deputi Bidang Perekonomian

2. Persentase . . .

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
		2 Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan		100%	100%			
Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Tersedianya hasil analisis dan penyelesaian izin prakarsa, Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang berkualitas	1 Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan berdasarkan peraturan perundangundangan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan	Jakarta	100%	100%	365,13	377,91	Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
		2 Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan		100%	100%			
Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah	Tersedianya hasil analisis dan penyelesaian izin prakarsa, Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah yang berkualitas	1 Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan	Jakarta	100%	100%	303,61	314,23	Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
		2 Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan		100%	100%			
Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Tersedianya hasil analisis dan penyelesaian izin prakarsa, Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas	1 Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan	Jakarta	100%	100%	469,13	485,55	Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		2 Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan		100%	100%			

Pelaksanaan . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
Pelaksanaan Analisis dan Administrasi di Bidang Litigasi dan Bantuan Hukum, Ekstradisi, Prerogatif dan Naturalisasi, serta Pengadministrasian Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya hasil analisis dan penyelesaian izin prakarsa, Rancangan Peraturan Perundangundangan, pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan	1 Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang perjanjian internasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan	Jakarta	100%	100%	1.168,67	1.209,58	Asisten Deputi Bidang Hukum
		2 Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan		100%	100%			
		3 Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan		100%	100%			
		4 Persentase Rancangan Keputusan Presiden dan Surat Kuasa Khusus Presiden yang akan ditetapkan/ditandatangani oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan		100%	100%			
Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan						**3.939,71**	**4.077,60**	
	1 Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden dan /atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik	**1 Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti presiden, wakil presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik**		**100%**	**100%**			
	2 Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri	**2 Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti**		**45%**	**45%**			
	3 Terselenggaranya hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	**2 Persentase pelayanan hubungan masyarakat terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar**		**100%**	**100%**			

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
Pelaksanaan Hubungan Dengan Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural dan Lembaga Daerah	Terselenggaranya hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan Lembaga Negara dan Daerah	Persentase dukungan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan Lembaga Negara dan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan standar	Jakarta	100%	100%	714,84	739,86	Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah
Pelaksanaan Hubungan Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik	Terselenggaranya hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik	Persentase dukungan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang dilaksanakan sesuai dengan standar	Jakarta	100%	100%	992,84	1.027,59	Asisten Deputi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik
Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti	Jakarta	45%	45%	910,77	942,64	Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat
Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Terselenggaranya hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar	1 Persentase pelayanan kehumasan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar	Jakarta	100%	100%	1.321,26	1.367,51	Asisten Deputi Hubungan Masyarakat
		2 Persentase hasil monitoring dan analisis media sesuai dengan standar						
		3 Persentase kegiatan peliputan dan dokumentasi Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar						
		4 Persentase kegiatan diseminasi informasi sesuai dengan standar						
Deputi Bidang Administrasi Aparatur						**1.159,93**	**1.200,53**	
	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dan administrasi penanganan administrasi pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan pejabat lainnya	**1 Persentase Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara**		**100%**	**100%**			

2. Persentase . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
		2 Persentase Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara		**100%**	**100%**			
		3 Persentase RKeppres tentang kenaikan pangkat,pemberhentian,dan pensiun ASN yang menduduki JPT Utama,JPT Madya,dan Jabatan Fungsional Jenjang Utama, serta alih status perwira tinggi TNI/Polri sebagai ASN yang disetujui oleh Mensesneg		**100%**	**100%**			
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pejabat Negara serta Administrasi Lainnya yang berkaitan Dengan Pejabat Negara	Meningkatnya kualitas penanganan administrasi pejabat negara dan pejabat lainnya	1 Persentase penyelesaian rancangan keppres mengenai pengangkatan pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya sesuai standar	Jakarta	100%	100%	654,36	677,26	Biro Administrasi Pejabat Negara
		2 Persentase rancangan Surat Presiden/Surat Menteri Sekretaris Negara/Surat Deputi Bidang Administrasi Aparatur mengenai pengangkatan pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang diselesaikan sesuai standar		100%	100%			
		3 Persentase Salinan dan Petikan Keppres mengenai pengangkatan pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang diselesaikan sesuai standar		100%	100%			
		4 Persentase naskah pelantikan pejabat negara dan pejabat lainnya yang diselesaikan sesuai standar		100%	100%			
		5 Persentase produk administrasi pejabat negara dan pejabat lainnya yang ditatausahakan, dikelola datanya serta diarsipkan dan didokumentasikan sesuai standar		100%	100%			

Penyelenggaraan . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pejabat Pemerintahan serta Administrasi Lainnya yang berkaitan dengan Pejabat Pemerintahan	Meningkatnya kualitas administrasi pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya	Persentase rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian, dan kenaikan pangkat pejabat pemerintahan serta rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat lainnya yang diselesaikan sesuai dengan standar	Jakarta	100%	100%	505,57	523,27	Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan
Sekretariat Kementerian						**8.995,95**	**9.310,81**	
	Meningkatnya efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kualitas pelayanan administrasi perjalanan dinas luar negeri	**Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara**		**3.0**	**3.0**			
Penyelenggaraan Koordinasi Kerjasama Teknik Luar Negeri	Terwujudnya koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan pelayanan administrasi perjalanan dinas luar negeri yang cepat dan tepat	1 Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan sesuai standar	Jakarta	100%	100%	8.995,95	9.310,81	Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri
		2 Persentase dokumen kerja sama teknik meliputi proyek, tenaga ahli dan beasiswa yang diselesaikan sesuai standar		100%	100%			
		3 Persentase rekomendasi fasilitas kerja sama teknik meliputi keimigrasian, perpajakan, kepabeanan, dan kendaraan yang diselesaikan sesuai standar		100%	100%			
		4 Persentase Program Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan (KTSS) Indonesia yang dilaksanakan		100%	100%			

Unit . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
UNIT ORGANISASI SEKRETARIAT PRESIDEN						**369.800,00**	**382.377,98**	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA						**369.800,00**	**382.377,98**	
Kepala Sekretariat Presiden						**369.800,00**	**382.377,98**	
	Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden	**1 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden**		**4.75**	**4.75**			**Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana**
		2 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden		**4.75**	**4.75**			**Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media**
Penyelenggaraan Tugas Teknis dan Administrasi Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers, dan Media kepada Presiden	1 Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden yang berkualitas	Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden	Jakarta, Bogor, Cipanas, Yogyakarta, Bali	4.75	4.75	369.800,00	382.377,98	Kepala Sekretariat Presiden
	2 Terselenggaranya dukungan manajemen Sekretariat Presiden yang berkualitas	Indeks kepuasan pengguna layanan administrasi Sekretariat Presiden		4.75	4.75			
	3 Terselenggaranya dukungan umum Sekretariat Presiden yang berkualitas	Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan umum Sekretariat Presiden		4.75	4.75			
	4 Terselenggaranya dukungan operasional perkantoran Istana Kepresidenan yang berkualitas	Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan operasional perkantoran Istana Kepresidenan		4.75	4.75			

SATUAN . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
SATUAN KERJA SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN						**131.800,00**	**136.395,40**	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA						**128.244,21**	**132.715,15**	
	Terselenggaranya dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden dalam perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan dengan baik dan lancar	**Jumlah laporan manajemen dan pelayanan administrasi**		**1**	**1**			
Deputi Bidang Administrasi						**128.244,21**	**132.715,15**	
Pelaksanaan Dukungan Perencanaan Anggaran, Keuangan dan Manajemen Kinerja	1 Layanan dukungan manajemen Eselon I	1 Persentase perencanaan dan evauasi anggaran sesuai standar	Jakarta	100%	100%	10.191,74	10.530,85	Biro Perencanaan dan Keuangan
		2 Persentase pengelolaan keuangan sesuai standar		100%	100%			
		3 Persentase pelaporan akuntansi dan BMN sesuai standar		100%	100%			
		4 Persentase pelaksanaan manajemen kinerja sesuai standar		100%	100%			
		5 Persentase pengelolaan Dana Operasional Wakil Presiden sesuai dengan standar		100%	100%			
	2 Layanan perkantoran	1 Persentase pembayaran gaji dan tunjangan sesuai standar		100%	100%			
		2 Pelaksanaan dukungan pengelola keuangan sesuai standar		100%	100%			

Pelaksanaan . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
Pelaksanaan Dukungan Tata Usaha, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Kepegawaian	Layanan dukungan manajemen Eselon I	1 Persentase persuratan, kearsipan dan reproduksi, serta ketatausahaan sesuai standar	Jakarta	100%	100%	2.118,59	2.192,74	Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi dan Kepegawaian
		2 Persentase pengelolaan kepegawaian sesuai standar		100%	100%			
		3 Persentase layanan kesehatan bagi pegawai sesuai standar		100%	100%			
Pelaksanaan Dukungan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Hasil analisis pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	1 Persentase pengelolaan kesekretariatan TNP2K sesuai standar	Jakarta	100%	100%	2.374,58	2.457,69	Sekretariat TNP2K
		2 Persentase pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai standar		100%	100%			
Pelaksanaan Dukungan Keprotokolan Wakil Presiden	Layanan Keprotokolan Wakil Presiden	1 Persentase dukungan kerumahtanggaan Wakil Presiden sesuai standar	Jakarta	100%	100%	68.575,65	70.975,80	Biro Protokol
		2 Persentase dukungan kerumahtanggaan kepada Sekretariat Wakil Presiden sesuai standar		100%	100%			
		3 Persentase dukungan keprotokolan kepada Wakil Presiden sesuai standar		100%	100%			
Pelaksanaan Dukungan Sarana Prasarana Sekretariat Wakil Presiden	1 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Jumlah layanan internal	Jakarta	100%	100%	44.983,65	46.558,08	Biro Umum
	2 Layanan Internal (Overhead)	Jumlah layanan internal (overhead)		100%	100%			
	3 Layanan Perkantoran	Persentase pelaksanaan kegiatan operasional dukungan sarana prasarana Sekretariat Wakil Presiden sesuai standar		100%	100%			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN						**3.555,79**	**3.680,24**	
	Meningkatnya kualitas analisis kebijakan kepada Wakil Presiden	**Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden**		**100%**	**100%**			

Deputi . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan						**1.134,06**	**1.173,75**	
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Peningkatan dan Pengembangan Kesejahteraan	Hasil analisis kebijakan di bidang peningkatan dan pengembangan kesejahteraan	Persentase hasil analisis kebijakan di bidang peningkatan dan pengembangan kesejahteraan sesuai standar	Jakarta	100%	100%	284,36	294,31	Asisten Deputi Peningkatan dan Pengembangan Kesejahteraan
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana	Hasil analisis kebijakan di bidang perlindungan sosial dan penanggulangan bencana	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang perlindungan sosial dan penanggulangan bencana sesuai standar	Jakarta	100%	100%	295,82	306,17	Asisten Deputi Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia	Hasil analisis kebijakan di bidang pembangunan sumber daya manusia	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang pembangunan sumber daya manusia sesuai standar	Jakarta	100%	100%	553,88	573,27	Asisten Deputi Pembangunan Sumber Daya Manusia
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan						**1.235,86**	**1.279,12**	
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Hasil analisis kebijakan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase laporan hasil analisis di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sesuai standar	Jakarta	100%	100%	234,36	242,56	Asisten Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Hasil analisis kebijakan di bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik sesuai standar	Jakarta	100%	100%	272,90	282,45	Asisten Deputi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri	Hasil analisis kebijakan di bidang hubungan luar negeri	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang hubungan luar negeri sesuai standar	Jakarta	100%	100%	197,38	204,29	Asisten Deputi Hubungan Luar Negeri
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Hasil analisis kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan sesuai standar	Jakarta	100%	100%	231,76	239,87	Asisten Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan

Pelaksanaan...

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Hasil analisis kebijakan di bidang komunikasi dan informasi publik	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang komunikasi dan informasi publik sesuai standar	Jakarta	100%	100%	299,46	309,94	Asisten Deputi Komunikasi dan Informasi Publik
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman						**1.185,87**	**1.227,38**	
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha	Hasil analisis kebijakan di bidang keuangan, investasi, dan badan usaha	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang keuangan, investasi, dan badan usaha sesuai standar	Jakarta	100%	100%	289,05	299,17	Asisten Deputi Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha
Asisten Deputi Bidang Industri, Perdagangan, Pariwisata dan, Ekonomi Kreatif	Hasil analisis kebijakan di bidang industri, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang industri, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif sesuai standar	Jakarta	100%	100%	302,59	313,18	Asisten Deputi Bidang Industri, Perdagangan, Pariwisata dan, Ekonomi Kreatif
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Hayati	Hasil analisis kebijakan di bidang ketahanan pangan dan sumber daya hayati	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang ketahanan pangan dan sumber daya hayati sesuai standar	Jakarta	100%	100%	267,69	277,06	Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Hayati
Asisten Deputi Bidang Infrastruktur, Energi, dan Tata Ruang	Hasil analisis kebijakan di bidang infrastruktur, energi, dan tata ruang	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang infrastruktur, energi dan tata ruang sesuai standar	Jakarta	100%	100%	326,54	337,97	Asisten Deputi Bidang Infrastruktur, Energi, dan Tata Ruang

SATUAN . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
SATUAN KERJA SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN						**35.000,00**	**36.221,60**	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA						**6.600,00**	**6.827,60**	
	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Militer Presiden	**Indeks kepuasan pengguna layanan di lingkungan Sekretariat Militer Presiden**		**3.85 (skala 5)**	**3.85 (skala 5)**			
Sekretaris Militer Presiden						**6.600,00**	**6.827,60**	
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Militer Presiden	Terwujudnya dukungan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Militer Presiden yang optimal	1 Indeks Kepuasan pengguna layanan administrasi perencanaan, evaluasi, dan laporan	Jakarta	3.85	3.85	6.600,00	6.827,60	Biro Umum
		2 Indeks Kepuasan pengguna layanan administrasi keuangan		3.85	3.85			
		3 Indeks Kepuasan pengguna layanan administrasi kepegawaian		3.85	3.85			
		4 Indeks Kepuasan pengguna layanan administrasi ketatausahaan dan perlengkapan		3.85	3.85			

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN DUKUNGAN KEBIJAKAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN						**28.400,00**	**29.394,00**	
	Terselenggaranya kegiatan VVIP, dukungan administrasi personel TNI dan POLRI, dan penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan yang berkualitas	**1 Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman**		**100%**	**100%**			
		2 Persentase pelayanan administrasi personel TNI dan POLRI yang disetujui oleh Presiden		**100%**	**100%**			
		3 Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden		**100%**	**100%**			
Sekretaris Militer Presiden						**28.400,00**	**29.394,00**	
Pengkoordinasian Pengamanan Fisik dan Non Fisik bagi VVIP	Terwujudnya koordinasi pengamanan yang efektif	Persentase penyelenggaraan koordinasi pengamanan fisik dan non fisik VVIP yang dilaksanakan sesuai standar	Jakarta	100%	100%	3.711,00	3.840,89	Biro Pengamanan
Penyelenggaraan Dukungan Teknis dan Administrasi Personel TNI dan Polri	Terwujudnya dukungan administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang tepat dan akurat	Persentase Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang diselesaikan sesuai standar	Jakarta	100%	100%	2.000,00	2.070,00	Biro Personil TNI dan Polri
Penyelenggaraan Administrasi Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	Terwujudnya dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang tepat dan akurat	1 Persentase Rancangan Keputusan Presiden tentang penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang diselesaikan sesuai standar	Jakarta	100%	100%	22.689,00	23.483,12	Biro Gelar, Tanda Jasa dan Kehormatan
		2 Persentase kelengkapan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang didistribusikan		100%	100%			

SATUAN . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
SATUAN KERJA PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN						**41.000,00**	**42.435,00**	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA						**41.000,00**	**42.435,00**	
	Tercapainya Pengamanan Presiden, Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan	**Persentase pengamanan fisik langsung jarak dekat terhadap Presiden, Wakil Presiden beserta Keluarga serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan**		**100%**	**100%**			
Pasukan Pengamanan Presiden						**41.000,00**	**42.435,00**	
Dukungan Pengamanan Presiden, Wakil Presiden beserta Keluarganya serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Pemerintah	Dukungan Pengamanan Presiden, Wakil Presiden beserta Keluarganya serta tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintah	Persentase kekuatan personel, jumlah kegiatan dan dukungan dalam pelaksanaan pengamanan terhadap Presiden, Wakil Presiden beserta Keluarga serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintah	Jakarta	100%	100%	41.000,00	42.435,00	Paspampres

SATUAN . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
SATUAN KERJA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN						**40.000,00**	**41.385,04**	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA						**40.000,00**	**41.385,04**	
	Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	**Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden**		**91%**	**95%**			
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden						**40.000,00**	**41.385,04**	
Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi	Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	1 Presentase pengelolaan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden	Jakarta	100%	100%	844,76	874,33	Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
		2 Jumlah rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu		2	2			
		3 Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Biro Data dan Informasi yang disusun		2	2			

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden	Terwujudnya dukungan pelayanan keprotokolan dan persidangan serta pelayanan administrasi umum di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden	1 Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan	Jakarta	100%	100%	39.155,24	40.510,71	Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
		2 Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan persidangan		100%	100%			
		3 Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan		2	2			
		4 Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan		10	10			
		5 Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai standar		1	1			
		6 Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan		9	9			
		7 Jumlah dokumen administrasi sarana dan prasarana sesuai ketentuan		1	1			
		8 Presentase penyediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan		100%	100%			
		9 Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa		100%	100%			
		10 Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan tahunan Biro Umum yang disusun		2	2			

SATUAN . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
SATUAN KERJA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN						**80.000,00**	**83.940,62**	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA						**80.000,00**	**83.940,62**	
	Terwujudnya Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana	**Persentase Pelaksanaan Layanan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban Dalam Peradilan Pidana**		**100%**	**100%**			
Sekretariat Jenderal LPSK						**80.000,00**	**83.940,62**	
Pemberian Layanan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban dan Dukungan Lainnya di Lingkungan	Terlaksananya Pelayanan Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban dan Dukungan Kelembagaan di Lingkungan LPSK	1 Persentase Pemberian Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan/atau Korban yang Sesuai Ketentuan	Jakarta	100%	100%	80.000,00	83.940,62	Sekretariat LPSK
		2 Persentase Dukungan Kelembagaan Terhadap Pemberian Perlindungan Saksi dan/atau Korban		100%	100%			
		3 Persentase Sarana dan Prasarana yang Mencukupi Dalam Mendukung Kegiatan Perlindungan Saksi dan/atau Korban		100%	100%			

SATUAN . . .

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
SATUAN KERJA KANTOR STAF PRESIDEN						**124.700,00**	**128.875,68**	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA						**124.700,00**	**128.875,68**	
	Terselenggaranya pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis	**Persentase terselenggaranya pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis sesuai rencana**		**100%**	**100%**			
Sekretariat Kantor Staf Presiden						**124.700,00**	**128.875,68**	
Pemberian Dukungan Kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Melaksanakan Pengendalian Program-Program Prioritas Nasional, Komunikasi Politik, dan Pengelolaan Isu Strategis	1 Terselenggaranya pemberian rekomendasi kebijakan pengendalian program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengendalian isu strategis yang diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden	Persentase terselenggaranya pemberian rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis sesuai rencana	Jakarta	100%	100%	124.700,00	128.875,68	Sekretariat KSP
	2 Terselenggaranya pemberian layanan operasional situation room dalam mendukung tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden	Persentase pemberian layanan operasional situation room dalam mendukung tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden sesuai ketentuan		100%	100%			

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam juta rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
SATUAN KERJA PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK GELORA BUNG KARNO						**161.720,55**	**161.720,55**	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA						**161.720,55**	**161.720,55**	
	-	-						
PPK Gelora Bung Karno						**161.720,55**	**161.720,55**	
Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno	Tingkat kepuasan pengguna layanan bidang olahraga dan non olahraga di Komplek Gelora Bung Karno	Jakarta	4 (indeks skala 5)		161.720,55	161.720,55	Direktur Utama PPK GBK

SATUAN . . .

SATUAN KERJA PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN						**230.251,40**	**230.251,40**	
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA						**230.251,40**	**230.251,40**	
	-	-						
PPK Kemayoran						**230.251,40**	**230.251,40**	
Pengelolaan Komplek Kemayoran	Meningkatnya kualitas pengelolaan Komplek Kemayoran	Tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan	Jakarta	4 (indeks skala 5)		230.251,40	230.251,40	Direktur Utama PPK Kemayoran

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,
dan Akuntabilitas Kinerja,

Agussalim

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2015-2019

MATRIKS KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
TAHUN 2015-2019

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Penyusunan/Penyempurnaan Standar Pelayanan/*Standard Operating Procedures* (SOP) Kementerian Sekretariat Negara	Adanya perubahan organisasi dan kebutuhan penyusunan/penyempurnaan Standar Pelayanan/*Standard Operating Procedures* (SOP) dari unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Administrasi Aparatur	Unit kerja yang terkait secara substansi dan Asdep Bidang Hukum, Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan penyusunan Peraturan Menteri	2015

2. Penyusunan . . .

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
2.	Penyusunan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Kementerian Sekretariat Negara	- Adanya perubahan organisasi Kementerian Sekretariat Negara - Kementerian Sekretariat Negara belum memiliki Petunjuk Pelaksanaan tersebut - Adanya perintah penyusunan akses dan keamanan arsip dari Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Administrasi Aparatur	- Biro Tata Usaha, Sekretariat Kementerian - Biro Informasi dan Teknologi, Sekretariat Kementerian - Biro Administrasi, Sekretariat Presiden - Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi dan Kepegawaian, Sekretariat Wakil Presiden - Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden - Asdep Bidang Hukum, Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	2015

3. Penyempurnaan . . .

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
3.	Penyempurnaan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Honorarium, Uang Lembur, Uang Makan, dan Perjalanan Dinas pada Satuan Kerja Bagian Anggaran 007 (Kementerian Sekretariat Negara)	- Adanya perubahan organisasi Kementerian Sekretariat Negara - Adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Honorarium, Uang Lembur, Uang Makan, dan Perjalanan Dinas	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Administrasi Aparatur	- Biro Keuangan, Sekretariat Kementerian - Biro Administrasi, Sekretariat Presiden - Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi dan Kepegawaian, Sekretariat Wakil Presiden - Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden - Asdep Bidang Hukum, Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	2015
4.	Penyusunan/Penyempurnaan Standar Pelayanan/*Standard Operating Procedures* (SOP) Kementerian Sekretariat Negara	Kebutuhan penyusunan/penyempurnaan Standar Pelayanan/*Standard Operating Procedures* (SOP) dari unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Administrasi Aparatur	Unit kerja yang terkait secara substansi dan Asdep Bidang Hukum, Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan penyusunan Peraturan Menteri	2016

5. Penyempurnaan . . .

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
5.	Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Sekretariat Negara	- Adanya perubahan ketentuan tentang Tata Naskah Dinas - Adanya perkembangan/kebutuhan organisasi Kementerian Sekretariat Negara	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Administrasi Aparatur	- Biro Tata Usaha, Sekretariat Kementerian - Biro Administrasi, Sekretariat Presiden - Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi dan Kepegawaian, Sekretariat Wakil Presiden - Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden - Asdep Bidang Hukum, Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	2016

6. Penyempurnaan . . .

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
6.	Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi *Standard Operating Procedures* (SOP) Kementerian Sekretariat Negara	Adanya perubahan ketentuan tentang Penyusunan dan Evaluasi *Standard Operating Procedures* (SOP)	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Administrasi Aparatur	- Biro Administrasi, Sekretariat Presiden - Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi dan Kepegawaian, Sekretariat Wakil Presiden - Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden - Asdep Bidang Hukum, Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	2016
7.	Penyusunan/Penyempurnaan Standar Pelayanan/*Standard Operating Procedures* (SOP) Kementerian Sekretariat Negara	Kebutuhan penyusunan/penyempurnaan Standar Pelayanan/*Standard Operating Procedures* (SOP) dari unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Administrasi Aparatur	Unit kerja yang terkait secara substansi dan Asdep Bidang Hukum, Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan penyusunan Peraturan Menteri	2017

8. Penyempurnaan . . .

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
8.	Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran pada Bagian Anggaran 007(Kementerian Sekretariat Negara)	Adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perencanaan dan Penganggaran Instansi Pemerintah	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Administrasi Aparatur	- Biro Perencanaan, Sekretariat Kementerian - Biro Administrasi, Sekretariat Presiden - Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Wakil Presiden - Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden - Asdep Bidang Hukum, Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	2017

9. Penyempurnaan . . .

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
9.	Penyempurnaan Permensesneg tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Kementerian Sekretariat Negara	Adanya perubahan ketentuan tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Administrasi Aparatur	- Biro Umum, Sekretariat Kementerian - Biro Umum, Sekretariat Presiden - Biro Umum, Sekretariat Wakil Presiden - Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden - Asdep Bidang Hukum, Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	2017
10.	Penyusunan/Penyempurnaan Standar Pelayanan/*Standard Operating Procedures* (SOP) Kementerian Sekretariat Negara	Kebutuhan penyusunan/penyempurnaan Standar Pelayanan/*Standard Operating Procedures* (SOP) dari unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Administrasi Aparatur	Unit kerja yang terkait secara substansi dan Asdep Bidang Hukum, Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan penyusunan Peraturan Menteri	2018

11. Penyempurnaan . . .

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
11.	Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Tata Surat Kepresidenan	Adanya kebutuhan organisasi Kementerian Sekretariat Negara	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Administrasi Aparatur	- Biro Tata Usaha, Sekretariat Kementerian - Biro Administrasi, Sekretariat Presiden - Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi dan Kepegawaian, Sekretariat Wakil Presiden - Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden - Asdep Bidang Hukum, Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	2018
12.	Penyusunan Arsip Vital	Adanya kebutuhan organisasi Kementerian Sekretariat Negara	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Administrasi Aparatur	- Biro Tata Usaha, Sekretariat Kementerian - Biro Administrasi, Sekretariat Presiden - Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi dan Kepegawaian,	2018

Sekretariat . . .

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
				Sekretariat Wakil Presiden - Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden - Asdep Bidang Hukum, Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	
13.	Penyusunan Jadwal Retensi Arsip	- Adanya perkembangan/kebutuhan organisasi Kementerian Sekretariat Negara - Amanat Undang-undang Kearsipan	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Administrasi Aparatur	- Biro Tata Usaha, Sekretariat Kementerian - Biro Administrasi, Sekretariat Presiden - Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi dan Kepegawaian, Sekretariat Wakil Presiden - Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden - Asdep Bidang Hukum, Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	2018

14. Penyempurnaan . . .

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
14.	Penyempurnaan Permensesneg Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara	Adanya perubahan pengaturan dalam penyusunan rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Administrasi Aparatur	Seluruh Asisten Deputi pada Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan	2018
15.	Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS Kementerian Sekretariat Negara	Adanya perubahan ketentuan tentang Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Administrasi Aparatur	- Biro Sumber Daya Manusia, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia - Biro Administrasi, Sekretariat Presiden - Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi dan Kepegawaian, Sekretariat Wakil Presiden - Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden - Asdep Bidang Hukum, Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	2019

16. Penyusunan . . .

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
16.	Penyusunan/Penyempurnaan Standar Pelayanan/*Standard Operating Procedures* (SOP) Kementerian Sekretariat Negara	Kebutuhan penyusunan/penyempurnaan Standar Pelayanan/*Standard Operating Procedures* (SOP) dari unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Administrasi Aparatur	Unit kerja yang terkait secara substansi dan Asdep Bidang Hukum, Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan penyusunan Peraturan Menteri	2019
17.	Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Audio Visual Kementerian Sekretariat Negara	Adanya perubahan ketentuan tentang Pengelolaan Arsip Audio Visual	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Administrasi Aparatur	- Biro Tata Usaha, Sekretariat Kementerian - Biro Administrasi, Sekretariat Presiden - Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi dan Kepegawaian, Sekretariat Wakil Presiden - Biro Umum,Sekretariat Militer Presiden - Asdep Bidang Hukum, Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	2019

18. Penyempurnaan . . .

18.	Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Presiden dan Wakil Presiden RI	Adanya perubahan ketentuan tentang keprotokolan	Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja, Deputi Bidang Administrasi Aparatur	- Biro Protokol, Sekretariat Presiden - Biro Protokol, Sekretariat Wakil Presiden - Asdep Bidang Hukum, Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan	2019

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,
dan Akuntabilitas Kinerja,

Agussalim